



LAPORAN KINERJA

PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN



SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TRIWULAN II TAHUN 2022



STASIUN PSDKP BELAWAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kata Pengantar

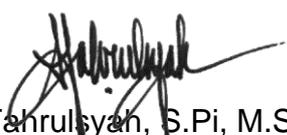
Puji dan Syukur Kehadirat Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja (Lkj) Triwulan II Tahun 2022 dapat terselesaikan. Pelaksanaan kegiatan pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) di Triwulan II Tahun 2022 telah diwarnai oleh sejumlah keberhasilan yang dicerminkan dengan pencapaian indikator kinerja sasaran sesuai target, di samping beberapa capaian indikator yang belum memenuhi target. Informasi kinerja tersebut disajikan dalam sebuah Laporan Kinerja (LKj) Triwulan II Tahun 2022 Unit Pelaksana Teknis Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan (UPT Stasiun PSDKP Belawan)

Laporan ini disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai visi, misi yang dibebankan kepada UPT Stasiun PSDKP Belawan Triwulan II Tahun 2022. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ke depan.

Kami berharap, Laporan ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja sekaligus tolak ukur peningkatan kinerja bagi seluruh staff UPT Stasiun PSDKP Belawan dan semua pihak yang terkait. Semoga motivasi yang telah tumbuh dan kerjasama yang telah dibangun dalam membangun kinerja pengawasan SDKP dapat terus ditingkatkan.

Belawan, 13 Juli 2022

Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan Belawan


Andri Fahrulsyah, S.Pi, M.Si
NIP. 19780901 200212 1 002

Ringkasan Eksekutif

Laporan Kinerja (LKj) UPT Stasiun PSDKP Belawan Triwulan II Tahun 2022 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Ditjen. PSDKP tahun 2020-2024 dan Rencana Kinerja Tahunan 2022 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan telah diintegrasikan dengan *Balanced Scorecard* (BSC). Penyusunan LKj pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun bersangkutan.

Sejalan dengan semangat reformasi birokrasi, UPT Stasiun PSDKP Belawan telah menyusun perjanjian kinerja Tahun 2022 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsinya serta menyempurnakannya melalui penerapan sistem pengelolaan kinerja berbasis BSC. Implementasi BSC dalam pengelolaan kinerja di lingkungan UPT Stasiun PSDKP Belawan, selain merupakan pemenuhan amanat kebijakan pengelolaan kinerja yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), juga ditujukan untuk:

1. Menterjemahkan strategi organisasi ke dalam rencana operasional dengan baik, sehingga manajemen kinerja organisasi akan selaras dengan strategi organisasi;
2. Membangun organisasi yang terus menerus melakukan perbaikan (*continuous improvement*); dan
3. Membangun keselarasan antar unit kerja dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi organisasi.

BSC Stasiun PSDKP Belawan menggunakan 3 (tiga) perspektif dalam BSC, yaitu: *Customer Perspective*, *Internal Process Perspective*, dan *Learn and Growth Perspective*. Dalam penggunaannya, Stasiun PSDKP Belawan hanya menggunakan 3 (tiga) perspektif BSC yaitu *Customer Perspective*, *Internal Process Perspective*, dan *Learn and Growth Perspective* sedangkan untuk *Stakeholders Perspective* dikarenakan Stasiun PSDKP Belawan merupakan Unit Pelaksana Teknis sebagai unit kerja pendukung yang mengacu pada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebagai unit kerja utama.

Sebagai implikasi penerapan BSC dalam upaya perencanaan Tahun 2022, Sasaran Strategis UPT Stasiun PSDKP Belawan bermuara pada 7 Sasaran Strategis (SS), yaitu: ⁽¹⁾ Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan kelautan; ⁽²⁾ Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan perikanan; ⁽³⁾

Terselenggaranya pengawasan sistem berbasis masyarakat yang partisipatif; ⁽⁴⁾ Terselenggaranya Operasi Armada pengawasan SDKP; ⁽⁵⁾ Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP; ⁽⁶⁾ Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan; dan ⁽⁷⁾ Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP.

Penilaian terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian Sasaran Strategis, diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Pada Tahun 2022, sebagai hasil dari implementasi BSC, terdapat 25 IKU pengawasan SDKP yang menjadi komitmen kinerja UPT Stasiun PSDKP Belawan. Pencapaian IKU Triwulan II Tahun 2022, dari 25 IKU level UPT Stasiun PSDKP Belawan terdapat 14 (empat belas) IKU berwarna hijau (terrealisasi 100%), IKU berwarna kuning tidak ada, IKU berwarna merah tidak ada, serta 11 (sebelas) IKU berstatus Putih (tidak ada skor),

Realisasi anggaran tahun 2022 yang telah dicapai oleh Stasiun Pengawasan SDKP Belawan sampai 30 Juni 2022 sebesar **48,06%** atau sebesar Rp **16.468.253.034,-** (*Enam Belas Milyar Empat Ratus Enam Puluh Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Tiga Puluh Empat Rupiah*) dari total anggaran yang di alokasikan yaitu Rp.**34.265.069.000,-** (*Tiga Puluh Empat Milyar Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah*). Melalui Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2022 ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan kinerja kegiatan selanjutnya sesuai dengan tujuan dan sasaran Perencanaan Tahun 2022.

Daftar Isi

Kata Pengantar	ii
Ringkasan Eksekutif.....	iii
Daftar Isi.....	v
Daftar Tabel.....	vii
Daftar Gambar.....	viii
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Data Umum Organisasi.....	2
D. Isu Aktual.....	5
E. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja.....	5
PERENCANAAN KINERJA	6
A. Arah Kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024	6
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	8
C. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2022.....	12
AKUNTABILITAS KINERJA	13
A. Capaian Kinerja Pembangunan Kelautan dan Perikanan Bidang Pengawasan SDKP Tahun 2022.....	13
1. Capaian Kinerja Utama Stasiun PSDKP Belawan Tahun 2022.....	13
B. Analisis Pencapaian Kinerja.....	16
1. Sasaran Kegiatan 1.1 : Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan kelautan yang sesuai ketentuan.	16
2. Sasaran Kegiatan 2.1 : Terselenggaranya Pengawasan Kepatuhan Pemangku Kepentingan Perikanan Yang Sesuai Ketentuan	24
3. Sasaran Kegiatan 3.1 : Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif	46
4. Sasaran Kegiatan 3.2 : Terselenggaranya Operasi Armada SDKP yang efektif	47
5. Sasaran Kegiatan 3.3 : Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan.....	52
6. Sasaran Kegiatan 4.1 : Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif.....	53
7. Sasaran Kegiatan 5.1 : Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP	59

PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	70
LAMPIRAN	71

Daftar Tabel

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Belawan Tahun 2022	9
Tabel 2. Capaian Kinerja Stasiun PSDKP Belawan Triwulan II Tahun 2022.....	13
Tabel 3. Tahapan pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Stasiun PSDKP Belawan.....	17
Tabel 4. Hasil Pengukuran IKU Presentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Stasiun PSDKP Belawan.....	18
Tabel 5. Pelaku usaha pengelolaan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan ruang laut yang di Periksa Kepatuhan nya lingkup Stasiun PSDKP Belawan	19
Tabel 6. Pelaku usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya	21
Tabel 7. Tahapan pemeriksaan dilakukan oleh Pengawas Perikanan terhadap pemeriksaan 1 (satu) KBLI subsektor penangkapan ikan	26
Tabel 8. Pelaku usaha subsektor penangkapan ikan yang telah sesuai dengan kriteria/tahapan pemeriksaan	26
Tabel 9. Tahapan pemeriksaan dilakukan oleh Pengawas Perikanan terhadap pemeriksaan 1 (satu) KBLI subsektor pembudidaya ikan.....	29
Tabel 10. Pelaku usaha subsektor penangkapan ikan yang telah sesuai dengan kriteria/tahapan pemeriksaan	29
Tabel 11. Tahapan pemeriksaan dilakukan oleh Pengawas Perikanan terhadap pemeriksaan 1 (satu) KBLI subsektor pengolahan ikan.....	35
Tabel 12. Pelaku usaha subsektor pengolahan ikan yang telah sesuai dengan kriteria/tahapan pemeriksaan.....	36
Tabel 13. Tahapan pemeriksaan dilakukan oleh Pengawas Perikanan terhadap pemeriksaan 1 (satu) KBLI subsektor pengangkutan dan pemasaran ikan.....	41
Tabel 14. Pelaku usaha subsektor pengangkutan dan pemasaran ikan yang telah sesuai dengan kriteria/tahapan pemeriksaan.....	42
Tabel 15. Capaian Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif.....	48
Tabel 16. Capaian IKU pada SK3.3 “Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan”	52
Tabel 17. Capaian IKU pada SK4.1 Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan Yang Efektif.....	54
Tabel 18. Capaian IKU Ke-8 Persentase Efektivitas penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan.....	55
Tabel 19. Capaian IKU Ke-9 Persentase Efektivitas Penyelesaian Penanganan Barang Bukti lingkup Stasiun PSDP Belawan	57
Tabel 20. Rincian Penyerapan Anggaran per Kegiatan Stasiun Pengawasan SDKP Belawan periode Januari – Maret 2022	68

Daftar Gambar

Gambar 1. Struktur Organisasi Stasiun PSDKP Belawan	4
Gambar 2. Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan SLO lingkup Stasiun PSDKP Belawan	61
Gambar 3. Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan LVHPi Lingkup Stasiun PSDKP Belawan	62
Gambar 4. Capaian IKU Presentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Belawan.....	66

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam konteks pembangunan kelautan dan perikanan, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) berperan dalam penegakan hukum dan peraturan perundangan-undangan di bidang kelautan dan perikanan guna menjamin terselenggaranya pemanfaatan dan pengelolaan SDKP yang tertib dan bertanggungjawab. Peran tersebut di implementasikan melalui pelaksanaan program/kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan melalui terwujudnya kepatuhan (*compliance*) pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Kinerja (LKj) UPT Stasiun Pengawasan SDKP Belawan tahun 2022 merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah diseminasi informasi capaian kinerja dalam satu tahun anggaran berdasarkan komitmen yang telah ditetapkan sebelumnya. LKj ini menginformasikan kegiatan-kegiatan yang menjadi fokus Stasiun Pengawas SDKP Belawan untuk mencapai target kinerja yang telah disusun dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Juknis Perjanjian Kinerja, pelaporan kinerja dan tatacara reviu atas laporan kinerja, dimana aturan tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan dalam rangka menuju perwujudan “*Good Governance*”.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud :

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Stasiun PSDKP Belawan Triwulan II Tahun 2022 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja pengawasan SDKP setiap tahun anggaran kepada masyarakat dan *stakeholders* lainnya.

2. Tujuan :

Tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari penerapan manajemen kinerja UPT Stasiun Pengawasan SDKP Belawan dari tahun sebelumnya dan memperbaiki kinerja kearah yang lebih baik dimasa datang, yang dimulai dari proses perencanaan secara benar, pelaksanaan dan evaluasinya. Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi yang dilakukan pada setiap bulan, akan dirumuskan beberapa rekomendasi sebagai masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi pencapaian target yang lebih baik di tahun berikutnya.

C. Data Umum Organisasi

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69/PERMEN-KP/2020 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Stasiun Pengawasan SDKP Belawan merupakan Unit Pelaksana Teknis yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Stasiun PSDKP Belawan menyelenggarakan beberapa fungsi yaitu:

- a) Penyusunan rencana, program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, serta laporan;

- b) Pelaksanaan operasional pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- c) Pelaksanaan bimbingan kepada Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS);
- d) Pelaksanaan penyiapan logistik dan pemeliharaan Kapal Pengawas Perikanan;
- e) Pelaksanaan penanganan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- f) Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengawasan; dan
- g) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

2. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi (TUSI) organisasi yang telah ditetapkan, perlu dilakukan pembagian tugas dan kewenangan yang digambarkan dalam struktur organisasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69/PERMEN-KP/2020 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, maka dalam menjalankan tugasnya Kepala Stasiun membawahi Kepala Urusan Umum, Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional, dimana masing-masing mempunyai tugas dan kewenangan seperti diuraikan dibawah ini:

a) Kepala Stasiun

Merumuskan kebijakan operasional, mengkoordinasikan, mengarahkan dan melaksanakan manajerial dibidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan serta melakukan pembinaan kepada bawahan dilingkungan Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan untuk mencapai kelancaran pelaksanaan tugas.

b) Kepala Urusan Umum

Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta pengelolaan urusan administrasi keuangan, barang kekayaan milik negara, kepegawaian, jabatan fungsional, persuratan, kearsipan, perlengkapan, dan rumah tangga.

c) Pelaksana Koordinasi Urusan Operasional Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran

Melakukan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, pembinaan kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas), serta evaluasi, dokumentasi, informasi dan pelaporan dibidang pengawasan dan penanganan pelanggaran sumber daya kelautan dan perikanan.

d) Pelaksana Koordinasi Urusan Sarana dan Prasarana Pengawasan

Melakukan pelaksanaan operasional dan penyiapan logistik kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, pemeliharaan sarana dan prasarana pengawasan, dan perencanaan dan pengembangan pengawakan kapal pengawas.

e) Jabatan Fungsional

Fungsional Pengawas melaksanakan kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan serta kegiatan lain sesuai dengan tugas jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan untuk fungsional lainnya disesuaikan dengan bidang tugas fungsional yang diembannya berdasarkan SK fungsional yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69/PERMEN-KP/2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, sebagai mana Struktur Organisasi pada gambar 1 dibawah ini:



Gambar 1. Struktur Organisasi Stasiun PSDKP Belawan

D. Isu Aktual

Isu aktual yang di hadapi Stasiun Pengawasan SDKP Belawan dapat di uraikan sebagai berikut:

- a. Tidak optimalnya hari operasi speedboat disebabkan oleh kerusakan mesin speedboat Napoleon.
- b. Penindakan/ pengenaan sanksi administratif terhadap kapal perikanan yang melakukan pelanggaran/kejahatan.
- c. Implementasi Peraturan Direktur Jenderal PSDKP NOMOR 6 TAHUN 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Bidang Perikanan.

E. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja

Secara garis besar sistematika penyajian Laporan Kinerja Stasiun PSDKP Belawan Triwulan II Tahun 2022 diuraikan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Menguraikan secara ringkas tentang latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja.

Bab II Perjanjian Kinerja

Menguraikan secara ringkas tentang Perencanaan Pengawasan SDKP dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja Stasiun PSDKP Belawan Triwulan II Tahun 2022.

Bab IV Penutup

Menjelaskan kesimpulan dan merekomendasikan perbaikan kinerja ke depan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdiri dari: ⁽¹⁾ Rencana Strategis Ditjen. PSDKP Tahun 2020-2024; ⁽²⁾ Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022 dan ⁽³⁾ Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Belawan Tahun 2022.

A. Arah Kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024

Rencana Strategis (Renstra) Ditjen. PSDKP 2020-2024 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai tugas dan fungsi yang diamanatkan. Renstra tersebut disusun selaras dengan arah kebijakan strategis nasional bidang kelautan dan perikanan 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam arah kebijakan KKP 2020-2024. Renstra Direktorat Jenderal PSDKP telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal PSDKP NOMOR 23A/ KEP-DJPSDKP/ 2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal PSDKP tahun 2020-2024.

Secara ringkas arah kebijakan Ditjen. PSDKP tahun 2020-2024 untuk mendukung Sasaran Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, diuraikan sebagai berikut:

1. Pengembangan SDM Aparatur Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang berkualitas dan berdaya saing;
2. Peningkatan kapasitas sarana, prasarana dan kelembagaan pengawasan SDKP;
3. Penguatan sinergi dengan penegak hukum di laut (TNI AL, POLRI, Bakamla);
4. Peningkatan komunikasi dengan *stakeholder* dan pelaku usaha kelautan dan perikanan; dan
5. Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP.

Bedasarkan arah kebijakan Pengawasan SDKP tersebut, ditetapkan sasaran strategis pencapaian dengan program kegiatan yang akan dilaksanakan

selama 5 (lima) tahun kedepan. Sasaran strategis tersebut digunakan juga untuk penyusunan rencana kerja dan perjanjian kinerja Ditjen. PSDKP.

1. Strategis Pencapaian Kebijakan Pengembangan SDM Aparatur Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang berkualitas dan berdaya saing, dilakukan melalui:
 - a. Membangun budaya kerja Ditjen PSDKP;
 - b. Mengembangkan kompetensi SDM Aparatur PSDKP;
 - c. Membangun pola karir PNS Ditjen. PSDKP; dan
 - d. Meningkatkan jumlah dan sebaran SDM Aparatur PSDKP.
2. Strategis Pencapaian Kebijakan Peningkatan kapasitas sarana, prasarana dan kelembagaan pengawasan SDKP, dilakukan melalui:
 - a. Membangun sarana pengawasan (kapal pengawas, *speedboat* dan sarana pengawasan lainnya);
 - b. Membangun infrastruktur pengawasan yang memadai;
 - c. Meningkatkan pemeliharaan kapal pengawas agar siap operasi; dan
 - d. Mengembangkan kelembagaan pengawasan.
3. Strategis Pencapaian Kebijakan Penguatan sinergi dengan penegak hukum di laut (TNI AL, POLRI, Bakamla), dilakukan melalui:
 - a. Operasi bersama pengawasan di laut;
 - b. Pertukaran data;
 - c. Penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan; dan
 - d. Peningkatan kapasitas SDM Pengawasan.
4. Strategis Pencapaian Kebijakan Peningkatan komunikasi dengan *stakeholder* dan pelaku usaha kelautan dan perikanan, dilakukan melalui:
 - a. Memperkuat sinergitas dan harmonisasi pengawasan SDKP dengan Pemerintah Daerah serta lintas sektor di tingkat Pusat;
 - b. Memelihara komitmen bersama dengan lembaga internasional dan regional dalam pemberantasan *IUU fishing*;
 - c. Menjalankan alur pendekatan pengawasan secara komprehensif, yakni: pencegahan (*preventif*), pembinaan, represif (*ultimum remedium*); dan
 - d. Menerapkan metode *auditing* dalam pengawasan SDKP yang mengedepankan upaya perbaikan berkelanjutan terhadap temuan ketidaksesuaian bagi para pelaku usaha kelautan dan perikanan.

5. Strategis Pencapaian Kebijakan Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP, dilakukan melalui:
 - a. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggungjawab;
 - b. Pemberian pemahaman kepada nelayan untuk tidak melintas batas ke perairan negara lain;
 - c. Optimalisasi peran serta masyarakat dalam mendukung pengawasan SDKP melalui POKMASWAS;
 - d. Menanamkan pengetahuan pengelolaan SDKP yang bertanggungjawab sejak dini melalui “PSDKP Mengajar”;
 - e. Meningkatkan peran aktif pemuda melalui “Pemuda Pelopor Pengawasan”; dan
 - f. Memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Pokmaswas yang berkontribusi besar.

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja adalah untuk: ⁽¹⁾ Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; ⁽²⁾ Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; ⁽³⁾ Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja, ⁽⁴⁾ Sebagai dasar penetapan sasaran kinerja, pemberian penghargaan dan sanksi pegawai.

Stasiun PSDKP Belawan telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2022 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsinya serta menyempurnakan melalui penerapan sistem pengelolaan kinerja berbasis BSC. Implementasi BSC dalam pengelolaan kinerja di lingkungan Stasiun PSDKP Belawan, selain merupakan pemenuhan amanat kebijakan pengelolaan kinerja yang telah ditetapkan oleh KKP, juga ditujukan untuk:

1. Menerjemahkan strategi organisasi ke dalam rencana operasional dengan baik, sehingga manajemen kinerja organisasi akan selaras dengan strategi organisasi;
2. Membangun organisasi yang terus menerus melakukan perbaikan (*continuous improvement*); dan
3. Membangun keselarasan antar unit kerja dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi organisasi.

Pembahasan PK Awal

Jumlah Indikator Kinerja Stasiun PSDKP Belawan pada awal periode tahun 2022 berjumlah Sasaran Kegiatan (SK) 7 (Tujuh) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) berjumlah 25 (Dua puluh lima). Indikator Kinerja Utama (IKU) berikut targetnya pada setiap Sasaran Kegiatan (SK) ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Belawan Tahun 2022

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
KEGIATAN 1. PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN				
SK1.1	Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan kelautan yang sesuai ketentuan	ISK1.1.1	Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	100
KEGIATAN 2. PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN				
SK2.1	Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan perikanan yang sesuai ketentuan	ISK2.1.1	Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	100
KEGIATAN 3. PEMANTAUAN, OPERASI ARMADA DAN INFRASTRUKTUR PENGAWASAN				
SK3.1	Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif	ISK3.1.1	Persentase Pokmaswas yang aktif mendukung pengawasan SDKP	87

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
SK3.2	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif	ISK3.2.1	Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas	87,5
		ISK3.2.2	Indeks Kinerja Operasi <i>Speedboat</i> Pengawas	87,5
		ISK3.2.3	Indeks Pemenuhan Logistik Armada Pengawasan SDKP	90
SK3.3	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	ISK3.3.1	Persentase penyelesaian perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP	100
KEGIATAN 4. PENANGANAN PELANGGARAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				
SK4.1	Terselenggaranya penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan yang efektif	ISK4.1.1	Persentase Efektivitas Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	93
		ISK4.1.2	Persentase Efektivitas Penyelesaian Penanganan Barang Bukti lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	93
		ISK4.1.3	Persentase Efektivitas Penyelesaian Penanganan Awak Kapal lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	93
		ISK4.1.4	Persentase Efektivitas Pengenaan Sanksi Administratif lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	80
		ISK4.1.5	Persentase Efektivitas Koordinasi dalam rangka penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	80

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
KEGIATAN 5. DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL LINGKUP DITJEN. PSDKP				
SK5.1	Tata kelola pemerintah yang baik lingkup Ditjen PSDKP	ISK5.1.1	Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) kapal perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (indeks)	80
		ISK5.1.2	Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) kapal perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (indeks)	80
		ISK5.1.3	Nilai WBK Stasiun PSDKP Belawan (nilai)	75
		ISK5.1.4	Indeks profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (indeks)	77
		ISK5.1.5	Nilai rekonsiliasi kinerja Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (nilai)	90
		ISK5.1.6	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja	21
		ISK5.1.7	Inovasi gugus kerja transformasi yang dihasilkan lingkup Stasiun PSDKP Belawan (inovasi)	1
		ISK5.1.8	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	75
		ISK5.1.9	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	75
		ISK5.1.10	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	86

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
		ISK5.1.11	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Belawan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	70
		ISK5.1.12	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (nilai)	89
		ISK5.1.13	Nilai kinerja anggaran (NKA) Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (nilai)	81

C. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2022

Pengukuran tingkat capaian IKU dilakukan dengan berpedoman pada formula penghitungan yang telah ditetapkan dalam Informasi Indikator Kinerja atau Manual IKU BSC. Selanjutnya nilai capaian tersebut dihitung dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target yang telah ditetapkan.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala melalui penyusunan laporan kinerja triwulanan didukung dengan implementasi Aplikasi BSC "Kinerjaku" yang merupakan aplikasi Pengelolaan Kinerja BSC berbasis informasi teknologi (dapat diakses di www.kinerjaku.kkp.go.id).

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Pembangunan Kelautan dan Perikanan Bidang Pengawasan SDKP Tahun 2022

1. Capaian Kinerja Utama Stasiun PSDKP Belawan Tahun 2022

Sebagaimana telah diuraikan pada Bab sebelumnya, berdasarkan implementasi BSC dalam pengelolaan kinerja, pada Tahun 2022 Stasiun PSDKP Belawan telah menyempurnakan dan menetapkan 7 (Tujuh) Sasaran Kegiatan (SK) dengan 25 (dua puluh lima) IKU. Capaian kinerja Triwulan II Tahun 2022 ditabulasikan seperti tercantum dalam Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Capaian Kinerja Stasiun PSDKP Belawan Triwulan II Tahun 2022

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2022	Target TW II	Realisasi TW II	Persentase Capaian (%)	
KEGIATAN 1. PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN							
SK1.1	Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan kelautan yang sesuai ketentuan	ISK1.1.1	Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	100	50	100	120,00%
KEGIATAN 2. PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN							
SK2.1	Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan perikanan yang sesuai ketentuan	ISK2.1.1	Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	100	100	100	100,00%
KEGIATAN 3. PEMANTAUAN, OPERASI ARMADA DAN INFRASTRUKTUR PENGAWASAN							
SK3.1	Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif	ISK3.1.1	Persentase Pokmaswas yang aktif mendukung pengawasan SDKP	87	-	-	-
SK3.2	Terselenggaranya Operasi Armada	ISK3.2.1	Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas	87,5	87,5	87,85	100,40%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target 2022	Target TW II	Realisasi TW II	Persentase Capaian (%)
	Pengawasan SDKP yang efektif	ISK3.2.2	Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas	87,5	87,5	92,13	105,29
		ISK3.2.3	Indeks Pemenuhan Logistik Armada Pengawasan SDKP	90	90	100	111,11
SK3.3	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	ISK3.3.1	Persentase penyelesaian perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP	100	-	-	-
KEGIATAN 4. PENANGANAN PELANGGARAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							
SK4.1	Terselenggaranya penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan yang efektif	ISK4.1.1	Persentase Efektivitas Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	93	50	94,38	120,00%
		ISK4.1.2	Persentase Efektivitas Penyelesaian Penanganan Barang Bukti lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	93	50	86,88	120,00%
		ISK4.1.3	Persentase Efektivitas Penyelesaian Penanganan Awak Kapal lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	93	50	85,63	120,00%
		ISK4.1.4	Persentase Efektivitas Pengenaan Sanksi Administratif lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	80	-	-	-
		ISK4.1.5	Persentase Efektivitas Koordinasi dalam rangka penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	80	-	-	-
KEGIATAN 5. DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL LINGKUP DITJEN. PSDKP							

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target 2022	Target TW II	Realisasi TW II	Persentase Capaian (%)
SK5.1	Tata kelola pemerintah yang baik lingkup Ditjen PSDKP	ISK5.1.1	Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) kapal perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (indeks)	80	80	88,8	111,00%
		ISK5.1.2	Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) kapal perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (indeks)	80	80	92,02	115,03%
		ISK5.1.3	Nilai WBK Stasiun PSDKP Belawan (nilai)	75	-	-	-
		ISK5.1.4	Indeks profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (indeks)	77	70	79,28	113,26%
		ISK5.1.5	Nilai rekonsiliasi kinerja Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (nilai)	90	-	-	-
		ISK5.1.6	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja	21	-	-	-
		ISK5.1.7	Inovasi gugus kerja transformasi yang dihasilkan lingkup Stasiun PSDKP Belawan (inovasi)	1	-	-	-
		ISK5.1.8	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	75	-	-	-
		ISK5.1.9	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	75	-	-	-
		ISK5.1.10	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	86	86	98,89	114,99%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2022	Target TW II	Realisasi TW II	Persentase Capaian (%)
		ISK5.1.11 Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Belawan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	70	70	100	100,00%
		ISK5.1.12 Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (nilai)	89	80	94,21	117,76%
		ISK5.1.13 Nilai kinerja anggaran (NKA) Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (nilai)	81	-	-	-

Penjelasan warna:

NO	WARNA	KETERANGAN
1		Baik (Skor \geq 100)
2		Hati-hati ($80 \leq$ Skor $<$ 100)
3		Buruk (Skor $<$ 80)
4		Belum Ada Skor

B. Analisis Pencapaian Kinerja

Periode Triwulan II Tahun 2022 Stasiun PSDKP Belawan telah melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Evaluasi dan analisis pada setiap Sasaran Kegiatan diuraikan sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan 1.1 : Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan kelautan yang sesuai ketentuan.

Pencapaian Sasaran Kegiatan “Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan kelautan yang sesuai ketentuan” diidentifikasi ke dalam 1 (satu) IKU, yaitu: **IKU Ke-1 “Presentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Stasiun PSDKP Belawan”** Ukuran keberhasilan IKU Ke-1 ini diperoleh dari capaian persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Stasiun PSDKP Belawan.

Untuk mengukur capaian IKU persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Stasiun PSDKP Belawan dilakukan dengan tahapan pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengawas Perikanan dan Polsus PWP3K terhadap 1 (satu) pelaku usaha dengan rincian sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. Tahapan pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Stasiun PSDKP Belawan

No	Tahapan Pemeriksaan	Nilai	Output
1	Surat Perintah Tugas (SPT)	0,10	Dokumen SPT
2	Pemeriksaan kesesuaian kegiatan usaha dengan peraturan perundang-undangan	0,70	Berita Acara Pengawasan (form BAP PPSDK)
3	Pelaporan	0,20	Laporan hasil pemeriksaan
Jumlah Nilai		1	

Pada TW II tahun 2022 IKU Presentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Stasiun PSDKP Belawan ditargetkan dengan presentase 50% kepatuhan pelaku usaha. Capaian pada TW II melebihi dari yang ditargetkan yaitu dengan capaian 100% sehingga persentase capaiannya sebesar 120,00%. Pelaku usaha yang di periksa sebanyak 7 pelaku usaha. IKU tersebut merupakan indikator kinerja baru yang ditetapkan berdasarkan Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024.

Hal-hal yang menyebabkan keberhasilan dalam pencapaian IKU ke-1 sebagai berikut:

1. SDM Pengawas Perikanan dan Pengawas Kelautan memiliki kompetensi.
2. Dilaksanakannya rapat bulanan yang bertujuan untuk menyusun rencana pengawasan pada bulan tersebut dan mengevaluasi kegiatan pengawasan pada bulan sebelumnya.
3. Untuk peningkatan Kompetensi telah diselenggarakan Bimtek.

Pencapaian IKU Presentase pelaku usaha yang di periksa kepatuhannya pada TW II tahun 2022 lebih besar bila dibandingkan dengan capaian TW II tahun 2021. Pada tahun 2021 capaian IKU Presentase pelaku usaha yang di periksa kepatuhannya sebesar 80% dan di TW II tahun 2022 capaiannya yaitu sebesar

100%. Namun capaian IKU Presentase pelaku usaha yang di periksa kepatuhannya pada TW II tahun 2022 tidak dapat di bandingkan dengan capaian 5 tahun sebelumnya, karena IKU Presentase pelaku usaha yang di periksa kepatuhannya merupakan indikator kinerja baru yang ditetapkan berdasarkan Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024. Capaian IKU Presentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Stasiun PSDKP Belawan, sebagaimana pada Tabel 4 berikut.

Tabel 4. Hasil Pengukuran IKU Presentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Stasiun PSDKP Belawan

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2022			
	TARGET	TARGET TW II	REALISASI	PRESENTASE CAPAIAN
Presentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	100	50	100	120,00 %

Untuk mencapai indikator kinerja ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 130.923.000 dan sampai dengan 30 Juni 2022 telah terealisasi sebesar Rp. 30.139.040 atau sebesar 23,02% . Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja pada Sub IKU dan analisis terhadap realisasi anggaran dapat disimpulkan belum efisien. Hal ini didasari oleh beberapa hal yaitu capaian pada Sub IKU ini telah tercapai dari target Triwulan II dengan anggaran yang digunakan masih 23,02%.

Kegiatan utama yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian Indikator kinerja Utama pada TW II tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan unit usaha Jenis Ikan yang dilindungi yang di Periksa Kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan.

Adapun capaian pengawasan unit usaha jenis ikan yang di lindungi yang diperiksa kepatuhannya pada TW II tahun 2022 yaitu 0 pelaku usaha. Namun sampai dengan TW II tahun 2022 telah di laksanakan pengawasan unit usaha jenis ikan yang di lindungi yang diperiksa kepatuhannya sebanyak 1 jenis ikan.

2. Pengawasan Unit Usaha Pengelolaan Produk dan Jasa Kelautan yang Diperiksa Kepatuhannya.

Adapun capaian pengawasan unit usaha pengelolaan produk dan jasa kelautan yang diperiksa kepatuhannya pada TW II tahun 2022 yaitu 0 pelaku usaha atau tidak terdapat capaian pengawasan karena belum ada pelaksanaan kegiatan.

3. Pengawasan Unit Usaha Pengelolaan Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Ruang Laut yang diperiksa Kepatuhannya

Adapun capaian pengawasan unit usaha pengelolaan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan ruang laut yang diperiksa kepatuhannya yaitu 2 unit pelaku usaha. Rincian pelaku usaha jenis ikan yang dilindungi sebagaimana tabel 5 dibawah ini:

Tabel 5. Pelaku usaha pengelolaan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan ruang laut yang di Periksa Kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan

NAMA PELAKU USAHA	OBJEK PENGAWASAN
Kelompok Tani Hutan (KTH) Cinta Mangrove	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawasan dilakukan terhadap Kelompok Tani Hutan (KTH) Cinta Mangrove dengan luas ± 346 Ha; - Dalam kegiatan pengawasan ini pengawas perikanan berkoordinasi dengan Ketua KTH Cinta Mangrove Bapak Rustam Efendi; - Izin pengelolaan berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.10270/MENLHKPSKL/PKPS/PSL.0/12/2019 tanggal 20 Desember 2019; - Kelompok ini beranggotakan 47 KK dengan izin pemanfaatan selama 35 tahun; - Kelompok Tani Hutan Cinta Mangrove mengelola kawasan hutan dengan melakukan beberapa jenis pemanfaatan seperti pembangunan nursery mangrove dan wisata tracking mangrove.
Kelompok Tani Hutan (KTH) Makmur	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawasan dilakukan terhadap Kelompok Tani Hutan (KTH) Makmur dengan luas ± 82 Ha; - Izin pengelolaan berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :

NAMA PELAKU USAHA	OBJEK PENGAWASAN
	SK.3702/ MENLHKPSKL/PKPS/PSL.0/5/2018 31 Mei 2018; - Kelompok ini beranggotakan 41 KK dengan izin pemanfaatan selama 35 tahun; - Kelompok Tani Hutan Cinta Mangrove mengelola kawasan hutan dengan melakukan pemanfaatan untuk wisata tracking mangrove.

Realisasi anggaran yang telah tercapai dalam mendukung kegiatan ini adalah sebesar Rp. 450.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dari anggaran yang dialokasikan sesuai dengan Rencana Aksi sebesar Rp.23.750.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) atau sebesar 1,89%. Realisasi anggaran ini digunakan dalam rangka dukungan pengawasan usaha pengelolaan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan ruang laut yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan.

Pelaksanaan tugas pengawasan usaha pengelolaan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan ruang laut yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan memiliki sumber daya manusia (personil) Pengawas Perikanan sebanyak 31 Orang untuk melakukan kegiatan pengawasan usaha pengelolaan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan ruang laut yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan yang meliputi 3 (tiga) provinsi: Satwas PSDKP Langsa (Prov.Aceh), Satwas PSDKP Asahan (Prov. Sumatra Utara), Satwas PSDKP Rokan Hilir (Prov. Riau). Berdasarkan Analisis Beban Kerja di Stasiun PSDKP Belawan kebutuhan Pengawas Perikanan sebanyak 61 Orang, dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya manusia dalam melakukan kegiatan pengawasan belum efisien dikarenakan masih kurangnya sumber daya manusia Pengawas Perikanan yang dibutuhkan bagi Stasiun PSDKP Belawan dalam melaksanakan kegiatan pengawasan dimaksud.

4. Pengawasan Unit usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya

Adapun capaian pengawasan unit usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya yaitu 5 unit pelaku usaha. Rincian pelaku usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya sebagaimana tabel 6 dibawah ini:

Tabel 6. Pelaku usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya

NAMA PELAKU USAHA	OBJEK PENGAWASAN
PT. Seafood Sumatera Perkasa	<ul style="list-style-type: none"> - PT. Seafood Sumatera Perkasa beralamat di Jl. Titi Pahlawan Nomor 38 Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara; - PT. Seafood Sumatera Perkasa termasuk dalam kategori UPI yang bergerak dalam bidang pengolahan, telah memiliki NIB Nomor 8120002962402 tanggal 20 September 2018 yang diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS; - PT. Seafood Sumatera Perkasa memiliki Persetujuan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan hidup Nomor 660/5993 tanggal 30 Desember 2020 yang diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan; - PT. Seafood Sumatera Perkasa dalam pengelolaan limbahnya telah memiliki IPAL Mandiri.
PT. Red Ribbon Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> - PT. Red Ribbon Indonesia beralamat di Jalan Sulawesi Kasawan Industri Medan (KIM) I; - PT. Seafood Sumatera Perkasa memiliki Rekomendasi Persetujuan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) Nomor 660/5993 tanggal

NAMA PELAKU USAHA	OBJEK PENGAWASAN
	<p>660/5569 yang diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perusahaan ini merupakan perusahaan pengolahan produk perikanan dengan komoditas yang dihasilkan yaitu berupa pembekuan Udang dan paha kodok; - PT. Red Ribbon Indonesia memiliki NIB Nomor 8120004872553 tanggal 25 Agustus 2018 yang diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS; - PT. Red Ribbon Indonesia telah melakukan pengelolaan limbahnya dengan baik, dimana limbah tersebut telah di alirkan melalui pipa ke tempat IPAL terpadu KIM.
PT. Halindo Berjaya Mandiri	<ul style="list-style-type: none"> - PT. Halindo Berjaya Mandiri di Jl. Burhanuddin Lk.II kota Tanjungbalai, Provinsi Sumatera Utara; - PT. Halindo Berjaya Mandiri telah memiliki dokumen perizinan berupa Nomor Induk Berusaha (NIB): 8120101890393 yang diterbitkan oleh Lembaga Penyelenggara dan Pengelola OSS Republik Indonesia; - PT. Halindo Berjaya Mandiri memiliki Izin Lingkungan nomor 503/007/SSPK-IL/DPM-PPTSP/2020 yang diterbitkan oleh tanggal 04 Januari 2020 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungbalai; - PT. Halindo Berjaya Mandiri dalam pengelolaan limbahnya telah memiliki IPAL Mandiri.
PT. Anugerah Keramat Indah	<ul style="list-style-type: none"> - PT. Anugerah Keramat Indah beralamat di Jl. Yos Sudarso Lk. V, Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai, Prov. Sumatera Utara; - PT. ini telah memiliki dokumen perizinan, yaitu NIB dengan Nomor 8120002982202 dan SIUP Perikanan yang diterbitkan oleh Lembaga Penyelenggara dan Pengelola OSS, Izin Lingkungan Nomor

NAMA PELAKU USAHA	OBJEK PENGAWASAN
	<p>503/0001/IL/DPM-PPTSP/2020 dari DPM PPTSP Kota Tanjungbalai pada tanggal 14 Februari 2020; dan Dokumen UKL-UPL yang sudah direkomendasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai dengan Nomor 660.2/198/DisLH/2020 tanggal 13 Februari 2020;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perusahaan memiliki IPAL Mandiri.
Semangat Baru	<ul style="list-style-type: none"> - UPI Semangat Baru beralamat di Jl. Garuda LK. IV Kel. Beting Kuala Kapias, Kec. Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai, Prov. Sumatera Utara; - Semangat Baru telah memiliki dokumen perizinan berupa Nomor Induk Berusaha (NIB): Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120200872086 dengan KBLI 46206 (Perdagangan Besar Hasil Perikanan yang diterbitkan oleh Lembaga Penyelenggara dan Pengelola OSS Republik Indonesia; - Semangat Baru Tidak memiliki IPAL/UKL-UPL tetapi sudah mendapat rekomendasi atas Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai dengan Nomor 660.2/131/DisLH/2020 tanggal 30 Januari 2020; - Izin Lingkungan Semangat Baru diterbitkan oleh LPP OSS berdasarkan surat persetujuan pemenuhan komitmen SPP Komitmen Izin Lingkungan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungbalai dengan nomor 503/0014/SSPK-IL/DPM-PPTSP/2020 pada tanggal 27 Juli 2020; - Semangat Baru bergerak di bidang penanganan dan pembekuan ikan, dimana air limbah yang dihasilkan merupakan air pencucian ikan.

Realisasi anggaran yang telah tercapai dalam mendukung kegiatan ini adalah sebesar Rp.8.045.000,- (Delapan Juta Empat Puluh Lima Ribu

Rupiah) dari anggaran yang dialokasikan sesuai dengan Rencana Aksi sebesar Rp.47.467.000,- (Empat Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah) atau sebesar 16,95%.

Pelaksanaan tugas pengawasan unit usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan memiliki sumber daya manusia (personil) Pengawas Perikanan sebanyak 31 Orang. Untuk melakukan kegiatan pengawasan unit usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan yang meliputi 3 (tiga) provinsi: Satwas PSDKP Langsa (Prov.Aceh), Satwas PSDKP Asahan (Prov. Sumatra Utara), Satwas PSDKP Rokan Hilir (Prov. Riau). Berdasarkan Analisis Beban Kerja di Stasiun PSDKP Belawan kebutuhan Pengawas Perikanan sebanyak 61 Orang, dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya manusia dalam melakukan kegiatan pengawasan belum efisien dikarenakan masih kurangnya sumber daya manusia Pengawas Perikanan yang dibutuhkan bagi Stasiun PSDKP Belawan dalam melaksanakan kegiatan pengawasan dimaksud.

2. Sasaran Kegiatan 2.1 : Terselenggaranya Pengawasan Kepatuhan Pemangku Kepentingan Perikanan Yang Sesuai Ketentuan

Pencapaian Sasaran Kegiatan “Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan perikanan yang sesuai ketentuan” diidentifikasi ke dalam 1 (satu) IKU, yaitu: **IKU Ke-2 “Presentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan lingkup Stasiun PSDKP Belawan”**. Capaian Presentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan lingkup Stasiun PSDKP Belawan pada TW II tahun 2022 tercapai 100% sesuai yang ditargetkan pada TW II tahun 2022 sebesar 100%. IKU ini dapat dibandingkan dengan Capaian IKU pada TW II tahun 2021 dengan Capaian sebesar 100%. IKU tersebut merupakan indikator kinerja yang ditetapkan berdasarkan Renstra Ditjen PSDKP 2022-2024.

Hal-hal yang menyebabkan keberhasilan dalam pencapaian IKU ke-1 sebagai berikut:

1. SDM Pengawas Perikanan dan Pengawas Kelautan memiliki kompetensi.
2. Dilaksanakannya rapat bulanan yang bertujuan untuk menyusun rencana pengawasan pada bulan tersebut dan mengevaluasi kegiatan pengawasan pada bulan sebelumnya.
3. Untuk peningkatan Kopetensi diselenggarakan Bimtek.

Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan lingkup Stasiun PSDKP Belawan, diperoleh dari hasil pengukuran agresi 4 (empat) pemeriksaan kepatuhan subsektor perikanan, antara lain: (1) Pemeriksaan kepatuhan subsektor penangkapan ikan, (2) Pemeriksaan kepatuhan subsektor pembudidaya ikan, (3) Pemeriksaan kepatuhan subsektor pengolahan ikan, (4) Pemeriksaan kepatuhan subsektor pengangkutan dan pemasaran ikan.

Secara umum, pencapaian kinerja tersebut disebabkan beberapa kegiatan yang dilaksanakan di Triwulan II tahun 2022, dengan melakukan kegiatan Supervisi pengawasan yang dilaksanakan sebagai upaya koordinasi antara UPT dengan Satuan Pengawas dan Wilayah Kerja lingkup Stasiun PSDKP Belawan. Untuk mencapai indikator kinerja ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.534.550.000 dan sampai dengan 30 Juni 2022 telah terealisasi sebesar Rp. 377.779.282 atau sebesar 24,62%. Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja pada Sub IKU ini dan analisis terhadap realisasi anggaran dapat disimpulkan belum efisien. Hal ini didasari oleh beberapa hal yaitu : capaian kinerja pada Sub IKU ini telah tercapai sesuai target dengan anggaran yang digunakan masih sebesar yaitu 24,62%.

Untuk Pembahasan capaian kepatuhan subsektor perikanan yang berkontribusi pada pencapaian kinerja Presentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan lingkup Stasiun PSDKP Belawan, sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan kepatuhan subsektor penangkapan ikan.

Nilai capaian kepatuhan subsektor penangkapan ikan ini diperoleh dari upaya pengawasan KBLI subsektor penangkapan ikan oleh Pengawas Perikanan dengan melakukan pemeriksaan kepatuhan teknis. Pengawasan subsektor penangkapan ikan dilakukan mengacu pada Peraturan Dirjen PSDKP Nomor 06 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Bidang Perikanan. Kategorisasi penyelesaian pemeriksaan KBLI penangkapan ikan sebagai berikut:

Tabel 7. Tahapan pemeriksaan dilakukan oleh Pengawas Perikanan terhadap pemeriksaan 1 (satu) KBLI subsektor penangkapan ikan

No	Tahapan Pemeriksaan	Nilai	Output
1	Surat Pemberitahuan Pemeriksaan ke Pelaku Usaha	0,15	-Surat Pemberitahuan -SPT -Daftar Pertanyaan Dokumen
2	Pemeriksaan Teknis	0,70	-Berita Acara Pemeriksaan -Formulir Pemeriksaan
3	Pelaporan	0,15	Laporan dan data dukung hasil pemeriksaan (data yang telah terinput dalam sistem pelaporan Dit. PPSDP)
Jumlah Nilai		1	

Pelaku usaha subsektor penangkapan ikan yang telah sesuai dengan kriteria/tahapan pemeriksaan (nilai) sampai dengan periode Triwulan II tahun 2022 sebanyak 10 unit usaha. Dari 10 pelaku usaha yang dilakukan pengawasan pada subsektor penangkapan ikan, pengawas perikanan telah melakukan pengawasan terhadap 2 (dua) KBLI yaitu 50142 (Angkutan Laut Luar Negeri Untuk Barang Khusus) dan 03111 (Penangkapan Pisces/ikan bersirip) di Laut. Rincian pemeriksaan kepatuhan subsektor penangkapan ikan di lingkup Stasiun PSDKP Belawan pada TW II tahun 2022 sebagaimana tabel 8 dibawah ini:

Tabel 6. Pelaku usaha subsektor penangkapan ikan yang telah sesuai dengan kriteria/tahapan pemeriksaan

NAMA PELAKU USAHA	OBJEK PENGAWASAN
PT. Sumatera Ocean Transindo	- PT. Sumatera Ocean Trasindo beralamat Jl. Jala IV No.32/34 Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelان Kota Medan Provinsi Sumatera Utara; - PT. Sumatera Ocean Transindo memiliki 3 kapal angkut yaitu KM. Asahan jaya II, KM. Lima Dai 8, KM. Manindo Jaya; - Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120109801641 yang diterbitkan 14 Agustus 2018 dengan kode KBLI 50142, dengan penyertaan modal dalam negeri;

NAMA PELAKU USAHA	OBJEK PENGAWASAN
	- Nilai Kepatuhan pelaku usaha adalah 85%, dalam kategori Baik Sekali.
Mahal Sanusi	- Nomor Induk Berusaha (NIB) 0215010202445 yang diterbitkan 24 Desember 2020 dengan kode KLBI 03111, dengan penyertaan modal dalam negeri; - Nilai Kepatuhan pelaku usaha adalah 67,56%, dalam kategori Baik.
Po Tjai	- Nomor Induk Berusaha (NIB) 0609210041753 yang diterbitkan 6 September 2021 dengan kode KLBI 03111, dengan penyertaan modal dalam negeri; - Nilai Kepatuhan pelaku usaha adalah 66,7%, dalam kategori Baik.
PT. Sumber Mestika Davindo	- Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120005893004 yang diterbitkan 30 Agustus 2018 dengan kode KLBI 03111, dengan penyertaan modal dalam negeri; - Nilai Kepatuhan pelaku usaha adalah 68,81%, dalam kategori Baik.
Suno	- Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120100851407 yang diterbitkan 10 Agustus 2018 dengan kode KLBI 03111, dengan penyertaan modal dalam negeri; - Nilai Kepatuhan pelaku usaha adalah 66,67%, dalam kategori Baik.
T. Syamsuar TM	- Usaha Penangkapan milik Bapak T. Syamsuar TM, dengan kode KBLI 02201001403850001; - Nilai kepatuhan pelaku usaha adalah 65%, dalam kategori Baik
Sulaiman Husen	- Usaha Penangkapan milik Bapak Sulaiman Husen, dengan kode KBLI 02200055625610001; - Nilai kepatuhan pelaku usaha adalah 65%, dalam kategori Baik.
Syafuruddin	- Usaha Penangkapan milik Bapak Syafuruddin, dengan kode KBLI 1217000682836; - Nilai kepatuhan pelaku usaha adalah 65%, dalam kategori Baik.
Zefri Maulanan	- Usaha Penangkapan milik Bapak Zefri Maulanan dengan kode KBLI 0311210000021;

NAMA PELAKU USAHA	OBJEK PENGAWASAN
	- Nilai kepatuhan pelaku usaha adalah 65%, dalam kategori Baik.
Ina Suryani	- Usaha Penangkapan milik Bapak Ina Suryani dengan kode KBLI 2211210031939; - Nilai kepatuhan pelaku usaha adalah 73,33 %, dalam kategori Sanagt Baik.

Realisasi anggaran yang telah tercapai dalam mendukung kegiatan ini adalah sebesar Rp. 175.948.826,- (Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Enam Rupiah) dari anggaran yang dialokasikan sesuai dengan Rencana Aksi sebesar RP. 555.000.000,- (*Lima Ratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah*) atau sebesar 31,70%.

Pelaksanaan tugas pengawasan Pelaku usaha subsektor penangkapan ikan memiliki sumber daya manusia (personil) Pengawas Perikanan sebanyak 31 orang untuk melakukan kegiatan pengawasan Pelaku usaha subsektor penangkapan ikan di lingkup Stasiun PSDKP Belawan yang meliputi 3 (tiga) provinsi: Satwas PSDKP Langsa (Prov.Aceh), Satwas PSDKP Asahan (Prov. Sumatra Utara), Satwas PSDKP Rokan Hilir (Prov. Riau). Berdasarkan Analisis Beban Kerja di Stasiun PSDKP Belawan kebutuhan Pengawas Perikanan sebanyak 61 Orang, dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya manusia dalam melakukan kegiatan pengawasan belum efisien dikarenakan masih kurangnya sumber daya manusia Pengawas Perikanan yang dibutuhkan bagi Stasiun PSDKP Belawan dalam melaksanakan kegiatan pengawasan dimaksud.

b. Pemeriksaan kepatuhan subsektor pembudidayaan ikan

Nilai capaian kepatuhan subsektor pembudidayaan ikan ini diperoleh dari upaya pengawasan KBLI subsektor pembudidayaan ikan oleh Pengawas Perikanan dengan melakukan pemeriksaan kepatuhan teknis. Pengawasan subsektor pembudidayaan ikan dilakukan mengacu pada Peraturan Dirjen PSDKP Nomor 06 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bidang Perikanan. Kategorisasi penyelesaian pemeriksaan KBLI penangkapan ikan sebagai berikut:

Tabel 9. Tahapan pemeriksaan dilakukan oleh Pengawas Perikanan terhadap pemeriksaan 1 (satu) KBLI subsektor pembudidaya ikan

No	Tahapan Pemeriksaan	Nilai	Output
1	Surat Pemberitahuan Pemeriksaan ke Pelaku Usaha	0,15	-Surat Pemberitahuan -SPT -Daftar Pertanyaan Dokumen
2	Pemeriksaan Teknis	0,70	-Berita Acara Pemeriksaan -Formulir Pemeriksaan
3	Pelaporan	0,15	Laporan dan data dukung hasil pemeriksaan (data yang telah terinput dalam sistem pelaporan Dit. PPSDP)
Jumlah Nilai		1	

Unit usaha pembudidaya ikan yang telah sesuai dengan kriteria/tahapan pemeriksaan (nilai) sampai dengan periode Triwulan II tahun 2022 sebanyak 18 unit usaha budidaya. Rincian pemeriksaan kepatuhan subsektor pembudidaya ikan di lingkup Stasiun PSDKP Belawan pada TW II tahun 2022 sebagaimana tabel 10 dibawah ini:

Tabel 10. Pelaku usaha subsektor penangkapan ikan yang telah sesuai dengan kriteria/tahapan pemeriksaan

NO	NAMA PELAKU USAHA – NAMA PERUSAHAAN	KBLI	HASIL PENGAWASAN
1	Berani Sembiring	03221 - Pembesaran ikan air tawar di kolam	- Belum Memiliki perizinan berusaha berbasis resiko berupa NIB dan juga belum memiliki standar usaha berupa CBIB. Pelaku usaha sudah menggunakan pakan dan obat yang sudah terdaftar di KKP; - Nilai Kepatuhan pelaku usaha adalah 75%, dalam kategori Baik.
2	Samudera Sitepu	03221 - Pembesaran ikan air tawar di kolam	- Belum Memiliki perizinan berusaha berbasis resiko berupa NIB dan juga belum memiliki standar usaha berupa CBIB. Pelaku usaha sudah menggunakan pakan dan obat yang sudah terdaftar di KKP;

NO	NAMA PELAKU USAHA – NAMA PERUSAHAAN	KBLI	HASIL PENGAWASAN
			- Nilai Kepatuhan pelaku usaha adalah 35%, dalam kategori Kurang Baik
3	Jeremiah Tarigan	03221 - Pembesaran ikan air tawar di kolam	- Belum Memiliki perizinan berusaha berbasis resiko berupa NIB dan juga belum memiliki standar usaha berupa CBIB. Pelaku usaha sudah menggunakan pakan dan obat yang sudah terdaftar di KKP; - Nilai Kepatuhan pelaku usaha adalah 35%, dalam kategori Kurang Baik.
4	Abdul Latif Ginting	03221 - Pembesaran ikan air tawar di kolam	- Belum Memiliki perizinan berusaha berbasis resiko berupa NIB dan juga belum memiliki standar usaha berupa CBIB. Pelaku usaha sudah menggunakan pakan dan obat yang sudah terdaftar di KKP; - Nilai Kepatuhan pelaku usaha adalah 55%, dalam kategori Baik.
5	Josep Ginting	03221 - Pembesaran ikan air tawar di kolam	- Belum Memiliki perizinan berusaha berbasis resiko berupa NIB dan juga belum memiliki standar usaha berupa CBIB. Pelaku usaha sudah menggunakan pakan dan obat yang sudah terdaftar di KKP; - Nilai Kepatuhan pelaku usaha adalah 55%, dalam kategori Baik.
6	Aquafarm Nusantara, PT	03222 - Pembesaran ikan air tawar di KJA	- Telah menerapkan cara pembesaran ikan yang baik dibuktikan dengan adanya sertifikat CBIB, benih berasal dari unit pembenihan yang belum bersertifikat, obat dan pakan yang digunakan telah terdaftar di KKP dan sesuai peruntukan;

NO	NAMA PELAKU USAHA – NAMA PERUSAHAAN	KBLI	HASIL PENGAWASAN
			- Nilai Kepatuhan pelaku usaha adalah 96,6%, dalam kategori Sangat Baik Sekali.
7	Aquafarm Nusantara, PT	03326 – Pembenihan ikan air tawar	- Telah menerapkan cara pembenihan ikan yang baik tetapi belum memiliki sertifikat CPIB, benih berasal dari unit pembenihan yang belum bersertifikat, obat dan pakan yang digunakan telah terdaftar di KKP dan sesuai peruntukan; - Nilai Kepatuhan pelaku usaha adalah 80%, dalam kategori Baik Sekali.
8	Syahrolisam	03221 - Pembesaran ikan air tawar di kolam	- Telah menerapkan cara pembesaran ikan yang baik dibuktikan dengan adanya sertifikat CBIB, obat dan pakan yang digunakan telah terdaftar di KKP dan sesuai peruntukan; - Nilai Kepatuhan pelaku usaha adalah 89,3%, dalam kategori Baik Sekali.
9	Ardianto	03211 - Pembesaran ikan/pisces bersirip di laut	- Telah menerapkan cara pembesaran ikan yang baik dibuktikan dengan adanya sertifikat CBIB, obat dan pakan yang digunakan telah terdaftar di KKP dan sesuai peruntukan; - Nilai Kepatuhan pelaku usaha adalah 88,5%, dalam kategori Baik Sekali.
10	M.Ruslan	03221 - Pembesaran Ikan Air Tawar Di Kolam	- Telah menerapkan cara pembesaran ikan yang baik dibuktikan dengan adanya sertifikat CBIB, obat dan pakan yang digunakan telah terdaftar di KKP dan sesuai peruntukan;

NO	NAMA PELAKU USAHA – NAMA PERUSAHAAN	KBLI	HASIL PENGAWASAN
			- Nilai Kepatuhan pelaku usaha adalah 75,5%, dalam kategori Baik Sekali.
11	Azwar	03211 - Pembesaran ikan/pisces bersirip di laut	- Telah menerapkan cara pembesaran ikan yang baik obat dan pakan yang digunakan telah terdaftar di KKP dan sesuai peruntukan. Tetapi belum memiliki NIB; - Nilai Kepatuhan pelaku usaha adalah 78,75%, dalam kategori Baik Sekali.
12	Syahril	03211 - Pembesaran ikan/pisces bersirip di laut	- Telah menerapkan cara pembesaran ikan yang baik obat dan pakan yang digunakan telah terdaftar di KKP dan sesuai peruntukan. Tetapi belum memiliki NIB; - Nilai Kepatuhan pelaku usaha adalah 83,05%, dalam kategori Baik Sekali.
13	Tuginem	03254 - Pembesaran crustacea air payau	- Telah menerapkan cara pembesaran ikan yang baik dibuktikan dengan adanya sertifikat CBIB, obat dan pakan yang digunakan telah terdaftar di KKP dan sesuai peruntukan; - Nilai Kepatuhan pelaku usaha adalah 77,5%, dalam kategori Baik Sekali.
14	Fauzi Ahmad	03254 - Pembesaran crustacea air payau	- Telah menerapkan cara pembesaran ikan yang baik dibuktikan dengan adanya sertifikat CBIB, obat dan pakan yang digunakan telah terdaftar di KKP dan sesuai peruntukan. Tetapi belum memiliki NIB;

NO	NAMA PELAKU USAHA – NAMA PERUSAHAAN	KBLI	HASIL PENGAWASAN
			- Nilai Kepatuhan pelaku usaha adalah 77,5%, dalam kategori Baik Sekali.
15	Sukatno	03254 - Pembesaran crustacea air payau	- Telah menerapkan cara pembesaran ikan yang baik dibuktikan dengan adanya sertifikat CBIB, obat dan pakan yang digunakan telah terdaftar di KKP dan sesuai peruntukan. Tetapi belum memiliki NIB; - Nilai Kepatuhan pelaku usaha adalah 77,5%, dalam kategori Baik Sekali.
16	M. Tajriansyah	03254 - Pembesaran crustacea air payau	- Telah menerapkan cara pembesaran ikan yang baik dibuktikan dengan adanya sertifikat CBIB, obat dan pakan yang digunakan telah terdaftar di KKP dan sesuai peruntukan. Tetapi belum memiliki NIB; - Nilai Kepatuhan pelaku usaha adalah 65%, dalam kategori Baik.
17	Zakaria Husen	03254 - Pembesaran crustacea air payau	- Telah menerapkan cara pembesaran ikan yang baik obat dan pakan yang digunakan telah terdaftar di KKP dan sesuai peruntukan. Tetapi belum memiliki NIB; - Nilai Kepatuhan pelaku usaha adalah 60%, dalam kategori Baik
18	Surya Windu Pertiwi, PT	03212 - Pembenihan Ikan Laut	- Telah menerapkan cara pembesaran ikan yang baik dibuktikan dengan adanya sertifikat CBIB, obat dan pakan yang digunakan telah terdaftar di KKP dan sesuai peruntukan. Perusahaan ini telah memiliki NIB;

NO	NAMA PELAKU USAHA – NAMA PERUSAHAAN	KBLI	HASIL PENGAWASAN
			- Nilai Kepatuhan pelaku usaha adalah 96%, dalam kategori Baik Sekali.

Kegiatan pengawasan usaha pembudidayaan ikan dalam rangka pelaksanaan peraturan Perundang-undangan di bidang usaha pembudidayaan ikan, hal ini sesuai dengan Undang-Undang No 45 Tahun 2009 tentang perikanan pasal 66B, yang menyatakan pelaksanaan tugas pengawas perikanan dilakukan di sentra kegiatan perikanan, area pembenihan ikan serta area pembudidayaan ikan.

Capaian IKU ini dapat dibandingkan dengan periode Triwulan II tahun 2021 karena IKU ini merupakan IKU yang sudah ada sejak tahun 2020. Apabila dibandingkan dengan target Renstra serta target pada Perjanjian Kinerja periode Tahun 2022 sebesar 100%, capaian pada Triwulan II tahun 2022 ini telah sesuai dengan rincian target kinerja serta target periode akhir Renstra. Hal ini menunjukkan probabilitas pencapaian target akhir tahun dapat tercapai.

Realisasi anggaran yang telah tercapai dalam mendukung kegiatan ini adalah sebesar Rp. 154.963.662,- (Seratus Lima Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupia) dari anggaran yang dialokasikan sesuai dengan Rencana Aksi sebesar 600.000.000,- (*Enam Ratus Juta Rupiah*) atau sebesar 25,83%.

Pelaksanaan tugas pengawasan Pelaku usaha subsektor pembudidayaan ikan memiliki sumber daya manusia (personil) Pengawas Perikanan sebanyak 31 Orang untuk melakukan kegiatan pengawasan Pelaku usaha subsektor pembudidayaan ikan di lingkup Stasiun PSDKP Belawan yang meliputi 3 (tiga) provinsi: Satwas PSDKP Langsa (Prov.Aceh), Satwas PSDKP Asahan (Prov. Sumatra Utara), Satwas PSDKP Rokan Hilir (Prov. Riau). Berdasarkan Analisis Beban Kerja di Stasiun PSDKP Belawan kebutuhan Pengawas Perikanan sebanyak 61 Orang, dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya manusia dalam melakukan kegiatan

pengawasan belum efisien dikarenakan masih kurangnya sumber daya manusia Pengawas Perikanan yang dibutuhkan bagi Stasiun PSDKP Belawan dalam melaksanakan kegiatan pengawasan dimaksud.

c. Pemeriksaan kepatuhan subsektor pengolahan ikan

Nilai capaian kepatuhan subsektor pengolahan ikan ini diperoleh dari upaya pengawasan KBLI subsektor pengolahan ikan oleh Pengawas Perikanan dengan melakukan pemeriksaan kepatuhan teknis. Pengawasan subsektor pengolahan ikan dilakukan mengacu pada Peraturan Dirjen PSDKP Nomor 06 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bidang Perikanan. Kategorisasi penyelesaian pemeriksaan KBLI subsektor pengolahan ikan sebagai berikut:

Tabel 7. Tahapan pemeriksaan dilakukan oleh Pengawas Perikanan terhadap pemeriksaan 1 (satu) KBLI subsektor pengolahan ikan

No	Tahapan Pemeriksaan	Nilai	Output
1	Surat Pemberitahuan Pemeriksaan ke Pelaku Usaha	0,15	-Surat Pemberitahuan -SPT -Daftar Pertanyaan Dokumen
2	Pemeriksaan Teknis	0,70	-Berita Acara Pemeriksaan -Formulir Pemeriksaan
3	Pelaporan	0,15	Laporan dan data dukung hasil pemeriksaan (data yang telah terinput dalam sistem pelaporan Dit. PPSPDP)
Jumlah Nilai		1	

Pengawasan Unit Pengolahan Ikan (UPI) dilakukan terhadap UPI skala mikro, menengah dan besar. Pengawasan UPI skala besar dilakukan dengan memeriksa dokumen Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)/Tanda Daftar Usaha Perikanan (TDUP), Surat Kelayakan Pengolahan (SKP) bagi usaha yang memasarkan produknya baik di dalam negeri maupun luar negeri, dan Sertifikat *Hazard Analysis & Critical Control Point (HACCP)* serta Sertifikat Kesehatan/*Health Certificate (HC)* bagi usaha yang mengekspor produk perikanan. Sedangkan pengawasan UPI skala kecil (Usaha Mikro Kecil dan Kelompok Pengolah Pemasar) dilakukan dengan memeriksa dokumen perizinan yaitu Tanda Daftar Perusahaan/Tanda Daftar Usaha Perikanan

(TDP/TDUP) atau PIRT, serta pengujian terhadap produk perikanan untuk mengetahui adanya Bahan Tambahan Berbahaya (BTB).

Unit usaha UPI yang telah sesuai dengan kriteria/tahapan pemeriksaan (nilai) pada periode Triwulan II tahun 2022 sebanyak 10 unit usaha UPI. Rincian pemeriksaan kepatuhan subsektor pengolahan ikan di lingkup Stasiun PSDKP Belawan pada TW II tahun 2022 sebagaimana tabel 12 dibawah ini:

Tabel 12. Pelaku usaha subsektor pengolahan ikan yang telah sesuai dengan kriteria/tahapan pemeriksaan

NO	NAMA PELAKU USAHA – NAMA PERUSAHAAN	KBLI	HASIL PENGAWASAN
1	PT AQUAFARM NUSANTARA	a.10213 - Industri pembekuan ikan; b. 10217 - Industri pendinginan/pengesan ikan.	- Lokasi di Dusun Dukuh, Kel. Wunut, Kec. Tulung, Kab. Klaten, Prov. Jawa Tengah; - NIB 8120015280138; - NPWP 01.061.787.5-058.000; - Nilai kepatuhan pada saat dilakukan kegiatan yaitu 100 % (baik sekali).
2	PT TOBA SURIMI INDUSTRIES	a. 10221 - Industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air (bukan udang) dalam kaleng; b. 10222 - Industri pengolahan dan pengawetan udang dalam kaleng; c. 10213 - Industri pembekuan ikan; d. 10293 - Industri pembekuan biota air lainnya.	- Lokasi di Komplek Cemara Asri Blok C6 No. 12, Desa/Kel. Sampali, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara; - NIB 8120002702482; - NPWP 01.718.918.4-125.000; - Nilai kepatuhan pada saat dilakukan kegiatan yaitu 90 % (baik sekali); UPI belum memiliki LKU 6 bulanan.
3	Indrawati	10219 - Industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan	- Lokasi di Jl. Kampung baru, Kel. Bagan Hulu, Kec. Bangko, Kab.

NO	NAMA PELAKU USAHA – NAMA PERUSAHAAN	KBLI	HASIL PENGAWASAN
			<p>Rokan Hilir, Provinsi Riau;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nilai kepatuhan pada saat dilakukan kegiatan yaitu 70 % (baik); belum memiliki SKP; belum memiliki LKU 6 bulanan; belum mencantumkan nomor kontak yang dapat dihubungi; belum melaporkan catatan produksi.
4	PT Yasuriang Samudera Rezeki	<ul style="list-style-type: none"> a. 10213 - ndustri pembekuan ikan; b. 10293 - Industri pembekuan Biota Air Lainnya; 	<ul style="list-style-type: none"> - Lokasi di Jl. Lingkar Lingkungan XI Komplek Perikanan Gabion Belawan Kelurahan Bagan Deli Kecamatan Medan Belawan; - NIB 8120001971344; - NPWP 71.333.253.4-112.000; - Nilai kepatuhan pada saat dilakukan kegiatan yaitu 80 % (baik sekali);
5	PT Karunia Samudera Jaya	<ul style="list-style-type: none"> a. 10213 - ndustri pembekuan ikan; b. 10293 - Industri pembekuan Biota Air Lainnya; 	<ul style="list-style-type: none"> - Lokasi di Dusun IV Kel. Hampan Perak Kec. Hampan Perak Kab. Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara; - NIB 9120200860095; - Nilai kepatuhan pada saat dilakukan kegiatan yaitu 80 % (baik sekali);
6	PT Karya Agung Lestari Jaya	<ul style="list-style-type: none"> a. 10213 - Industri pembekuan ikan; b. 10214 - Industri pemindangan ikan; c. 10293 - Industri pembekuan biota air lainnya. 	<ul style="list-style-type: none"> - Lokasi di Jl. Gabion Perikanan Nusantara No. 4, Kel. Bagan Deli, Kec. Medan Bclawan, Medan, Sumatera Utara; - NIB 9120208262812;

NO	NAMA PELAKU USAHA – NAMA PERUSAHAAN	KBLI	HASIL PENGAWASAN
			<ul style="list-style-type: none"> - NPWP 01.135.462.8-112.000; - Nilai kepatuhan pada saat dilakukan kegiatan yaitu 90 % (baik sekali); UPI belum memiliki LKU 6 bulanan.
7	PT Red Ribbon Indonesia	a. 10293 - Industri pembekuan biota air lainnya.	<ul style="list-style-type: none"> - Lokasi di Jl. K. L. Yos Sudarso KM 10,5 KIM I, Mabar, Medan Deli, Medan, Sumatera Utara; - NIB 8120004872553; - NPWP 01.100.476.9-112.000; - Nilai kepatuhan pada saat dilakukan kegiatan yaitu 80 % (baik sekali); UPI belum memiliki LKU 6 bulanan; belum memiliki laporan realisasi modal dan tenaga kerja 3 bulanan.
8	PT Halindo Berjaya Mandiri	a. 10217 - Industri pendinginan/pengesan ikan;	<ul style="list-style-type: none"> - Lokasidi Jl, Burhanuddin Lk. II, Kel. Perjuangan, Kec. Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai; - NIB 8120101890393; - NPWP 74.572.938.4-115.000; - Nilai kepatuhan pada saat dilakukan kegiatan yaitu 58,16 % (baik); UPI belum memiliki LKU 6 bulanan; belum memiliki laporan realisasi modal dan tenaga kerja 3 bulanan; belum memiliki informasi usaha dan nomor kontak yang

NO	NAMA PELAKU USAHA – NAMA PERUSAHAAN	KBLI	HASIL PENGAWASAN
			dapat dihubungi; belum menerapkan prosedur efektif terkait perencanaan, komunikasi, dan risiko; belum menetapkan dan belum melakukan pencatatan perkembangan kegiatan usaha.
9	PT Anugerah Keramat Indah	a. 03133 - Jasa pasca panen penangkapan ikan di laut;	<ul style="list-style-type: none"> - Lokasi di Jl. KL. Yos Sudarso, Kel. Merbau, Kec. Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai; - NIB 8120002982202; - NPWP 31.444.907.5-115.000; - Nilai kepatuhan pada saat dilakukan kegiatan yaitu 82 % (baik sekali); UPI belum memiliki LKU 6 bulanan; belum memiliki laporan realisasi modal dan tenaga kerja 3 bulanan; belum melakukan pencatatan perkembangan kegiatan usaha.
10	Semangat Baru	a. 03133 - Jasa pasca panen penangkapan ikan di laut;	<ul style="list-style-type: none"> - Lokasi di Jl. Garuda Lk. IV, Kel. Beting Kuala Kapias, Kec. Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai; - NIB 8120200872086; - NPWP 06.053.795.8-115.000; - Nilai kepatuhan pada saat dilakukan kegiatan

NO	NAMA PELAKU USAHA – NAMA PERUSAHAAN	KBLI	HASIL PENGAWASAN
			yaitu 82 % (baik sekali); UPI belum memiliki LKU 6 bulanan; belum memiliki laporan realisasi modal dan tenaga kerja 3 bulanan; belum melakukan pencatatan perkembangan kegiatan usaha.

Capaian SUB IKU ini dapat dibandingkan dengan periode Triwulan II tahun 2021 karena IKU ini merupakan IKU yang telah ada sejak 2020. Apabila dibandingkan dengan target Renstra serta target pada Perjanjian Kinerja periode Tahun 2022 sebesar 100%, capaian pada Triwulan II tahun 2022 ini telah sesuai dengan rincian target kinerja serta target periode akhir Renstra yaitu 100%. Hal ini menunjukkan probabilitas pencapaian target akhir tahun dapat tercapai.

Realisasi anggaran yang telah tercapai dalam mendukung kegiatan ini adalah sebesar Rp. 21.340.525,- (Dua Puluh Satu Juta Tiga Ratus Empat Puluh Juta Lima Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) dari anggaran yang dialokasikan sesuai dengan Rencana Aksi sebesar Rp. 242.550.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) atau sebesar 8,80%. Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja pada Sub IKU ini dan analisis terhadap realisasi anggaran dapat disimpulkan belum efisien. Hal ini didasari oleh beberapa hal: capaian kinerja pada IKU ini telah tercapai sebesar 100% dengan realisasi anggaran masih sebesar 8,80% .

Pelaksanaan tugas pengawasan Pelaku usaha subsektor pengolahan ikan memiliki sumber daya manusia (personil) Pengawas Perikanan sebanyak 31 orang untuk melakukan kegiatan pengawasan Pelaku usaha subsektor pengolahan ikan di lingkup Stasiun PSDKP Belawan yang meliputi 3 (tiga)

provinsi: Satwas PSDKP Langsa (Prov. Aceh), Satwas PSDKP Asahan (Prov. Sumatra Utara), Satwas PSDKP Rokan Hilir (Prov. Riau). Berdasarkan Analisis Beban Kerja di Stasiun PSDKP Belawan kebutuhan Pengawas Perikanan sebanyak 61 Orang, dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya manusia dalam melakukan kegiatan pengawasan belum efisien dikarenakan masih kurangnya sumber daya manusia Pengawas Perikanan yang dibutuhkan bagi Stasiun PSDKP Belawan dalam melaksanakan kegiatan pengawasan dimaksud.

d. Pemeriksaan kepatuhan subsektor pengangkutan dan pemasaran ikan

Nilai capaian kepatuhan subsektor pengangkutan dan pemasaran ikan ini diperoleh dari upaya pengawasan KBLI subsektor pengangkutan dan pemasaran oleh Pengawas Perikanan dengan melakukan pemeriksaan kepatuhan teknis. Pengawasan subsektor pengolahan ikan dilakukan mengacu pada Peraturan Dirjen PSDKP Nomor 06 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bidang Perikanan. Kategorisasi penyelesaian pemeriksaan KBLI subsektor pengangkutan dan pemasaran ikan sebagai berikut:

Tabel 8. Tahapan pemeriksaan dilakukan oleh Pengawas Perikanan terhadap pemeriksaan 1 (satu) KBLI subsektor pengangkutan dan pemasaran ikan

No	Tahapan Pemeriksaan	Nilai	Output
1	Surat Pemberitahuan Pemeriksaan ke Pelaku Usaha	0,15	-Surat Pemberitahuan -SPT -Daftar Pertanyaan Dokumen
2	Pemeriksaan Teknis	0,70	-Berita Acara Pemeriksaan -Formulir Pemeriksaan
3	Pelaporan	0,15	Laporan dan data dukung hasil pemeriksaan (data yang telah terinput dalam sistem pelaporan Dit. PPSPD)
Jumlah Nilai		1	

Unit usaha subsektor pengangkutan dan pemasaran ikan yang telah sesuai dengan kriteria/tahapan pemeriksaan (nilai) pada periode Triwulan II tahun 2022 sebanyak 15 unit usaha. Rincian pemeriksaan kepatuhan subsektor

pengangkutan dan pemasaran ikan di lingkup Stasiun PSDKP Belawan pada TW II tahun 2022 sebagaimana tabel 14 dibawah ini:

Tabel 14. Pelaku usaha subsektor pengangkutan dan pemasaran ikan yang telah sesuai dengan kriteria/tahapan pemeriksaan

NO	NAMA PELAKU USAHA – NAMA PERUSAHAAN	KBLI	HASIL PENGAWASAN
1	PT LAUTAN PERSADA	46206 - Perdagangan Hasil Perikanan	- Lokasi di JL. Gabion Perikanan Perum Prasarana Perikanan Samudera Belawan; - NIB 8120101802538; - Nilai Kepatuhan pelaku usaha adalah 63%, dalam kategori Baik.
2	CV REZEKI KITA	46206 - Perdagangan Hasil Perikanan	- Lokasi di Jl. Kapt R Sulian Kp. Salam Sejahtera No. 14, Belawan I, Medan Belawan, Medan; - NIB 81202000802437; - Nilai Kepatuhan pelaku usaha adalah 53%, dalam kategori Baik.
3	PT ANUGERAH ALAM INDUSTRI	46206 - Perdagangan Hasil Perikanan	- Lokasi di Jl. Jala IV NO. 32 Lk. III, kel. Rengas Pulau, Medan Marelan, Kota Medan; - NIB 9120204200489; - Nilai Kepatuhan pelaku usaha adalah 73%, dalam kategori Baik.
4	PT. TOBA SURIMI INDUSTRIES	46339 - PERDAGANGAN BESAR MAKANAN DAN MINUMAN LAINNYA	- Lokasi di Jl. Pulau Pinang 2, KIM II, Saentis-Deli Serdang; - NIB 8120002702482; - Nilai Kepatuhan pelaku usaha adalah 91,25%, dalam kategori Baik Sekali.
5	UD. BUDIDAYA	47245 - Perdagangan eceran daging dan ikan olahan	- Lokasi di Jl. Asahan No. 74 Kel. Indra Sakti Kec. Tanjungbalai Selatan; - NIB 9120204692951;

NO	NAMA PELAKU USAHA – NAMA PERUSAHAAN	KBLI	HASIL PENGAWASAN
			- Nilai Kepatuhan Teknis pelaku usaha perdagangan besar hasil perikanan 100% (Baik sekali).
6	ANUGERAH BINTANG NELAYAN	47245-Perdagangan eceran daging dan ikan olahan	- Lokasi di Jl. Asahan No. 30 Lk. IV Kel. Indra Sakti Kec. Tanjungbalai Selatan; - NIB 220009780174; - Nilai Kepatuhan Teknis pelaku usaha perdagangan besar hasil perikanan 100% (Baik sekali).
7	MK	47245-Perdagangan eceran daging dan ikan olahan	- Lokasi di Jl. Asahan Kel. Indra Sakti Kec. Tanjungbalai Selatan; - NIB 9120302832323; - Nilai Kepatuhan Teknis pelaku usaha perdagangan besar hasil perikanan 100% (Baik sekali).
8	KUALA HIKMAH	47245-Perdagangan eceran daging dan ikan olahan	- Lokasi di Jl. Asahan No. 97.61 Kel. Indra Sakti Kec. Tanjungbalai Selatan; - NIB 9120305851226; - Nilai Kepatuhan Teknis pelaku usaha perdagangan besar hasil perikanan 100% (Baik sekali).
9	BINTANG TERANG	47245-Perdagangan eceran daging dan ikan olahan	- Lokasi di Jl. Asahan No. 81 Kel. Indra Sakti Kec. Tanjungbalai Selatan; - NIB 9120200842703; - Nilai Kepatuhan Teknis pelaku usaha perdagangan besar hasil perikanan 100% (Baik sekali).
10	AC	47245-Perdagangan	- Lokasi di Jl. Asahan No.101-103 Kel. Indra Sakti Kec. Tanjungbalai Selatan;

NO	NAMA PELAKU USAHA – NAMA PERUSAHAAN	KBLI	HASIL PENGAWASAN
		eceran daging dan ikan olahan	<ul style="list-style-type: none"> - NIB 9120003372623; - Nilai Kepatuhan Teknis pelaku usaha perdagangan besar hasil perikanan 100% (Baik sekali).
11	ANG TEK WIE	47245-Perdagangan eceran daging dan ikan olahan	<ul style="list-style-type: none"> - Lokasi di Jl. Asahan Kel. Indra Sakti Kec. Tanjungbalai Selatan; - NIB 9120404824013; - Nilai Kepatuhan Teknis pelaku usaha perdagangan besar hasil perikanan 100% (Baik sekali).
12	PT. HALINDO BERJAYA MANDIRI	46206-Perdagangan Besar Hasil Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> - Lokasi di Jl. Burhanuddin Lk. II Kel. Perjuangan Kec. Teluk Nibung; - NIB 8120101890393; - Nilai Kepatuhan Teknis pelaku usaha perdagangan besar hasil perikanan 59,55% (Baik)
13	PT. ANUGERAH KERAMAT INDAH	46206-Perdagangan Besar Hasil Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> - Lokasi di Jl. KL. Yos Sudarso Kel. Sei Merbau Kec. Teluk Nibung; - NIB 8120002982202; - Nilai Kepatuhan Teknis pelaku usaha perdagangan besar hasil perikanan 55% (Baik)
14	SEMANGAT BARU	46206-Perdagangan Besar Hasil Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> - Lokasi di Jl. Garuda Lk. IV Kec. Beting Kuala Kapias; - NIB 8120200872086; - Nilai Kepatuhan Teknis pelaku usaha perdagangan besar hasil perikanan 50% (Baik)
15	SYUKRI SULAIMAN		<ul style="list-style-type: none"> - Nilai Kepatuhan Teknis pelaku usaha perdagangan

NO	NAMA PELAKU USAHA – NAMA PERUSAHAAN	KBLI	HASIL PENGAWASAN
			besar hasil perikanan 65% (Baik)

Capaian IKU 2022 ini dapat dibandingkan dengan periode Triwulan II tahun 2021 karena IKU ini merupakan IKU yang telah ada sejak 2020. Apabila dibandingkan dengan target Renstra serta target pada Perjanjian Kinerja periode Tahun 2022 sebesar 100%, capaian pada Triwulan II tahun 2022 ini telah sesuai dengan rincian target kinerja serta target periode akhir Renstra. Hal ini menunjukkan probabilitas pencapaian target akhir tahun dapat tercapai.

Pengawasan utama yang dilakukan adalah pengawasan terhadap ketertelusuran (*traceability*) distribusi ikan di lingkup Stasiun PSDKP Belawan, untuk memastikan kesesuaian dengan ketentuan yang berlaku. Pengendalian kegiatan importasi ikan diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 15 tahun 2011 tentang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang Masuk ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.

Realisasi anggaran yang telah tercapai dalam mendukung kegiatan ini adalah sebesar Rp. 13.706.400,- (Tiga Belas Juta Enam Ribu Empat Ratus Rupiah) dari anggaran yang dialokasikan sesuai dengan Rencana Aksi sebesar Rp. 137.000.000,- (*Seratus Tiga Puluh Tujuh Juta Rupiah*) atau sebesar 10 %. Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja pada Sub IKU ini dan analisis terhadap realisasi anggaran dapat disimpulkan belum efisien. Hal ini didasari oleh beberapa hal: capaian kinerja pada IKU ini telah tercapai sebesar 100% dengan realisasi anggaran masih sebesar 10%.

Pelaksanaan tugas pengawasan Pelaku usaha subsektor pengangkutan dan pemasaran ikan memiliki sumber daya manusia (personil) Pengawas Perikanan sebanyak 31 Orang untuk melakukan kegiatan pengawasan Pelaku usaha subsektor pengolahan ikan di lingkup Stasiun PSDKP Belawan

yang meliputi 3 (tiga) provinsi: Satwas PSDKP Langsa (Prov. Aceh), Satwas PSDKP Asahan (Prov. Sumatra Utara), Satwas PSDKP Rokan Hilir (Prov. Riau). Berdasarkan Analisis Beban Kerja di Stasiun PSDKP Belawan kebutuhan Pengawas Perikanan sebanyak 61 Orang, dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya manusia dalam melakukan kegiatan pengawasan belum efisien dikarenakan masih kurangnya sumber daya manusia Pengawas Perikanan yang dibutuhkan bagi Stasiun PSDKP Belawan dalam melaksanakan kegiatan pengawasan dimaksud.

3. Sasaran Kegiatan 3.1 : Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif

Pencapaian Sasaran Kegiatan “Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif” diidentifikasi ke dalam 1 (satu) IKU, yaitu: **IKU Ke-3 “Persentase Pokmaswas yang aktif mendukung pengawasan SDKP”**. Capaian IKU “Persentase Pokmaswas yang aktif mendukung pengawasan SDKP” dengan target yang ditetapkan sebesar 87%. Salah satu tools yang digunakan adalah “Form Keaktifan POKMASWAS” yang disiapkan oleh Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada dan didistribusikan ke (setiap UPT/DKP Provinsi). Pembinaan terhadap POKMASWAS dilakukan dengan menyesuaikan rencana aksi UPT Stasiun PSDKP Belawan. Hasil pembinaan tersebut wajib dikirimkan dalam bentuk laporan pembinaan POKMASWAS dengan merujuk pada “Form Keaktifan POKMASWAS”. Setiap Pokmaswas yang dianggap **aktif** bilamana telah melaporkan kegiatan pembinaan dengan melampirkan Form Pembinaan yang dilengkapi dengan dokumentasi dapat berupa foto/video. Pengukuran IKU ini dilakukan pada periode Triwulan IV 2022. Pada TW II Tahun 2022 IKU belum dilaksanakan kegiatan pembinaan POKMASWAS yang aktif dengan melakukan pelaporan dan pengisian Form Pembinaan POKMASWAS. Capaian IKU Persentase Pokmaswas yang aktif mendukung pengawasan SDKP TW II pada tahun 2022 tidak dapat dibandingkan dengan Capaian IKU TW II pada tahun 2021 karena beda IKU. IKU tersebut merupakan indikator kinerja baru yang ditetapkan berdasarkan Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024.

Adapun dukungan anggaran untuk pencapaian Persentase tindak lanjut informasi Pokmaswas lingkup Stasiun PSDKP Belawan dialokasikan sebesar

Rp. 163.635.000,- (*Seratus Enam Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tiga Puluh Lima Ribu*) . Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja pada Sub IKU ini dan analisis terhadap realisasi anggaran dapat disimpulkan belum efisien. Hal ini didasari oleh beberapa hal: capaian kinerja pada IKU ini belum tercapai dengan realisasi anggaran masih sebesar 0%.

Pelaksanaan tugas dalam upaya pengawasan Pokmaswas yang aktif mendukung pengawasan SDKP dilakukan Oleh Stasiun PSDKP Belawan dengan berkoordinasi dengan Seditjen PSDKP hal Narasumber pada saat pelaksanaan kegiatan Pembinaan Pokmaswas.

Pelaksanaan tugas pengawasan pengawasan Pokmaswas yang aktif mendukung pengawasan SDKP memiliki sumber daya manusia (personil) Pengawas Perikanan sebanyak 31 Orang untuk melakukan kegiatan pengawasan Pelaku usaha subsektor pengolahan ikan di lingkup Stasiun PSDKP Belawan yang meliputi 3 (tiga) provinsi: Satwas PSDKP Langsa (Prov.Aceh), Satwas PSDKP Asahan (Prov. Sumatra Utara), Satwas PSDKP Rokan Hilir (Prov. Riau). Berdasarkan Analisis Beban Kerja di Stasiun PSDKP Belawan kebutuhan Pengawas Perikanan sebanyak 61 Orang, dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya manusia dalam melakukan kegiatan pengawasan belum efisien dikarenakan masih kurangnya sumber daya manusia Pengawas Perikanan yang dibutuhkan bagi Stasiun PSDKP Belawan dalam melaksanakan kegiatan pengawasan dimaksud.

4. Sasaran Kegiatan 3.2 : Terselenggaranya Operasi Armada SDKP yang efektif

Dalam rangka pencapaian SK 3.2 “Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif” diidentifikasi ke dalam 3 (tiga) IKU, yaitu: IKU Ke-4 Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas, IKU Ke-5 Indeks Kinerja Operasi *Speedboat* Pengawas, IKU Ke-6 Indeks Pemenuhan Logistik Armada Pengawasan SDKP. Adapun capaian dari SK3.2 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 9. Capaian Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif

No	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2022		
		TARGET	TARGET TW II	CAPAIAN
1	Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas	87.5	87,85	100,40%
2	Indeks Kinerja Operasi <i>Speedboat</i> Pengawas	87.5	92,13	105,29%
3	Indeks Pemenuhan Logistik Armada Pengawasan SDKP	90	100	111,11%

IKU ini merupakan IKU baru pada tahun 2022 dan tidak dapat dilakukan perbandingan dengan capaian IKU pada TW II Tahun 2021. IKU ini dilakukan pengukuran dan ditargetkan pada TW II dan TW IV dengan target 87,5. Untuk mencapai indikator kinerja ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 15.604.118.000 dan sampai dengan 30 Juni 2022 telah terealisasi sebesar Rp. 9.098.328.121 atau sebesar 58,31% . Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja pada Sub IKU ini dan analisis terhadap realisasi anggaran dapat disimpulkan belum efisien. Hal ini didasari oleh beberapa hal: capaian kinerja pada IKU ini telah tercapai dengan realisasi anggaran masih sebesar 58,31%. Penjelasan masing-masing IKU pada SK3.2 Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif adalah sebagai berikut:

IKU Ke-4 Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas (Indeks)

Indeks Kinerja Operasional Kapal Pengawas adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kemajuan terhadap operasional kapal pengawas agar terwujudnya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif. Indeks Kinerja Operasional Kapal Pengawas terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, yakni:

- 1) Jumlah Kapal Perikanan yang Diperiksa;
- 2) Persentase *Coverage Area* Pengawasan;
- 3) Persentase Capaian Hari Operasi;
- 4) Persentase Jumlah Tindak Lanjut atas Target Operasi yang diberikan;
- 5) Jumlah Tangkapan Kapal Pelaku *IUU Fishing*;

- 6) Jumlah Penyitaan Alat Tangkap Terlarang;
- 7) Jumlah Pemutusan/pengangkatan Rumpon Ilegal;
- 8) Jumlah kegiatan Kapal Pengawas terhadap Kegiatan Nasional, Regional, Internasional dan dukungan Kegiatan Sosial/SAR.
- 9) Jumlah pengawasan di kawasan konservasi, *destructive fishing* dan pelanggaran kelautan lainnya

Kategori Penilaian Kinerja sebagai berikut:

Interval	Nilai Kinerja
0 – 50	Tidak Baik
50 – 75	Kurang Baik
75 – 90	Baik
90 – 100	Sangat Baik

Pada Triwulan II tahun 2022 capaian IKU ini sebesar 87,85 atau 100,40% dari target TW II Tahun 2022 sebesar 87,5. IKU ini merupakan IKU baru pada tahun 2022 dan tidak dapat dilakukan perbandingan dengan capaian IKU pada TW II Tahun 2021. IKU ini akan dilakukan pengukuran dan ditargetkan pada TW II dan TW IV dengan target 87,5. IKU tersebut merupakan indikator kinerja baru yang ditetapkan berdasarkan Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024.

Adapun dukungan anggaran untuk pencapaian Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas dialokasikan sebesar Rp.15.441.314.000,- (Lima Belas Milyar Empat Ratus Empat Puluh Satu Juta Tiga Ratus Empat Belas Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 9.050.412.121 (Sembilan Milyar Lima Puluh Juta Empat Ratus Dua Belas Ribu Seratus Dua Puluh Satu Rupiah) atau 58,61%. Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja pada Sub IKU ini dan analisis terhadap realisasi anggaran dapat disimpulkan belum efisien. Hal ini didasari oleh beberapa hal: capaian kinerja pada IKU ini belum tercapai dengan realisasi anggaran masih sebesar 58,61%.

IKU Ke-5 Indeks Kinerja Operasi *Speedboat* Pengawas (Indeks)

Indeks Kinerja Operasi *Speedboat* Pengawas adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kemajuan terhadap operasional *Speedboat* Pengawas agar terwujudnya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif. Indeks Kinerja Operasi *Speedboat* Pengawas terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, yakni:

- 1) Jumlah Kapal Perikanan yang Diperiksa;
- 2) Persentase *Coverage Area* Pengawasan;
- 3) Persentase Capaian Hari Operasi;
- 4) Jumlah Tangkapan Kapal Pelaku *IUU Fishing*;
- 5) Jumlah Penyitaan Alat Tangkap Terlarang;
- 6) Jumlah Kapal Perikanan yang Diperiksa.

Kategori Penilaian Kinerja sebagai berikut:

Interval	Nilai Kinerja
0 – 50	Tidak Baik
50 – 75	Kurang Baik
75 – 90	Baik
90 – 100	Sangat Baik

Pada Triwulan II tahun 2022 capaian IKU ini sebesar 92,13 atau 105,29% dari target TW II Tahun 2022 sebesar 87,5. IKU ini merupakan IKU baru pada tahun 2022 dan tidak dapat dilakukan perbandingan dengan capaian IKU pada TW II Tahun 2021. IKU ini akan dilakukan pengukuran dan ditargetkan pada TW II dan TW IV dengan target 87,5. IKU tersebut merupakan indikator kinerja baru yang ditetapkan berdasarkan Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024

Adapun dukungan anggaran untuk pencapaian Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas dialokasikan sebesar Rp.162.804.000,- (Seratus Enam Puluh Dua Juta Delapan Ratus Empat Ribu Rupiah). Sampai dengan 30 Juni 2022 telah terealisasi sebesar Rp. 47.916.000 atau sebesar 29,43%. Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja pada Sub IKU ini dan analisis terhadap realisasi anggaran dapat disimpulkan belum efisien. Hal ini didasari oleh beberapa hal: capaian kinerja pada IKU ini sudah tercapai dengan realisasi anggaran masih sebesar 29,43%.

IKU Ke-6 Indeks Pemenuhan Logistik Armada Pengawasan SDKP

Indeks pemenuhan logistik armada pengawasan SDKP adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk mengukur pemenuhan kebutuhan logistik kapal pengawas untuk mendukung operasi pengawasan SDKP. Logistik yang dimaksud meliputi pemenuhan Logistik Kapal dan pemenuhan Logistik Personel.

Logistik kapal terdiri dari :

- a. Bahan Bakar Minyak (BBM) , dan
- b. Pelumas

Logistik Personel terdiri dari :

- a. Bahan Makanan
- b. Air Tawar, dan
- c. Alat-alat Pelayanan (ATK, Bahan Komputer, Komaliwan, Peta dan atau Buku Jurnal Deck & Mesin)

Kategori Penilaian Pemenuhan Logistik

No	Nilai Interval Indeks Pemenuhan Logistik	Score	Indeks Pemenuhan Logistik Armada Pengawasan SDKP
1	0 - 25	D	Tidak Terpenuhi
2	26 - 50	C	Kurang Terpenuhi
3	51 - 75	B	Terpenuhi
4	76 - 100	A	Sangat Terpenuhi

Pada Triwulan II tahun 2022 capaian IKU ini sebesar 100 atau 111,11% dari target TW II Tahun 2022 sebesar 90. IKU tersebut merupakan indikator kinerja baru yang ditargetkan pada tahun 2022 dengan target pada TW II dan TW IV sebesar 90. Capaian IKU Indeks Pemenuhan Logistik Armada Pengawasan SDKP pada Triwulan II tahun 2022 tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada Triwulan II tahun 2021, hal tersebut dikarenakan IKU ini merupakan IKU baru di tahun 2022.

Realisasi anggaran yang telah tercapai dalam mendukung kegiatan ini adalah sebesar Rp.7.704.798.400,- (Tujuh Milyar Tujuh Ratus) dari anggaran yang dialokasikan sesuai dengan alokasi anggaran pada tahun 2022 sebesar Rp.12.473.908.000,- (Dua Belas Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Delapan Ribu Rupiah) atau sebesar 61,77%. Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja pada Sub IKU ini dan analisis terhadap realisasi anggaran dapat disimpulkan belum efisien. Hal ini didasari oleh beberapa hal: capaian kinerja pada IKU ini sudah tercapai dengan realisasi anggaran masih sebesar 61,77%.

5. **Sasaran Kegiatan 3.3 : Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan**

Dalam rangka pencapaian SK3.3 “Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan” Stasiun PSDKP Belawan telah mengidentifikasi ke dalam 1 (satu) IKU, yaitu: **IKU Ke-7 “Persentase penyelesaian perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP”**. Adapun Capaian IKU Ke-7 pada SK3.3 “Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan” dapat dilihat pada Tabel 16.

Tabel 10. Capaian IKU pada SK3.3 “Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan”

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2022		
	TARGET	TARGET TW II	CAPAIAN
Persentase penyelesaian perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP	100%	0	0

Penjelasan Pencapaian IKU dari SK3.3 sebagai berikut:

IKU Ke-7 Persentase penyelesaian perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP

Persentase penyelesaian perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP adalah jumlah Sarana Pengawasan SDKP yang selesai dirawat dibandingkan dengan target kegiatan perawatan Sarana Pengawasan SDKP yang dilaksanakan oleh Direktorat POA/UPT PSDKP. Sarana Pengawasan yang dimiliki Stasiun PSDKP Belawan meliputi: 3 (satu) unit Kapal Pengawas Perikanan dan 1 (satu) unit *Speedboat* Pengawas.

Perawatan Sarana Pengawasan SDKP terdiri dari: perawatan pencegahan (*preventive maintenance*), perawatan prediktif (*predictive maintenance*), dan perawatan darurat (*breakdown maintenance*).

Pelaksanaan kegiatan perawatan Sarana Pengawasan SDKP dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran dengan target persentase penyelesaian perawatan sebesar 100%. Pada TW II Tahun 2022 IKU Ke-7 belum dapat

dihitung dan memiliki capaian, IKU ini akan tercapai pada TW IV tahun 2022 dengan target capaian 100%.

IKU ini merupakan IKU yang telah ada sejak Tahun 2021 dan bila dibandingkan pada capaian TW II tahun 2022, IKU ini sama-sama belum ada capaian Kinerja Baik TW II 2021 maupun TW II 2022. Realisasi anggaran yang telah tercapai dalam mendukung kegiatan ini adalah sebesar Rp.690.101.639,- (Enam Ratus Sembilan Puluh Juta Seratus Satu Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah) dari anggaran yang dialokasikan sesuai dengan alokasi anggaran pada tahun 2022 sebesar Rp.4.111.730.000,- (Empat Milyar Seratus Sebelas Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) atau sebesar 16,78%. Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja pada Sub IKU ini dan analisis terhadap realisasi anggaran dapat disimpulkan belum efisien. Hal ini didasari oleh beberapa hal: capaian kinerja pada IKU belum tercapai dengan realisasi anggaran masih sebesar 16,78%.

6. Sasaran Kegiatan 4.1 : Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif

Dalam rangka pencapaian SK4.1 “Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan Yang Efektif” Stasiun PSDKP Belawan telah mengidentifikasi ke dalam 5 (lima) IKU, yaitu: **(1) IKU Ke-8 Persentase Efektivitas penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan lingkup Stasiun PSDKP Belawan; (2) IKU Ke-9 Persentase Efektivitas Penyelesaian Penanganan Barang Bukti lingkup Stasiun PSDP Belawan; (3) IKU Ke-10 Persentase Efektivitas Penyelesaian Penanganan Awak Kapal lingkup Stasiun PSDKP Belawan (4) IKU Ke-11 Persentase Efektivitas penganan sanksi administratif lingkup Stasiun PSDKP Belawan (5) IKU-12 Persentase Efektivitas Koordinasi dalam rangka penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan lingkup Stasiun PSDKP Belawan.** Adapun Capaian IKU pada SK4.1 Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan Yang Efektif sebagaimana Tabel 16 berikut.

Tabel 11. Capaian IKU pada SK4.1 Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan Yang Efektif

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2022		
		TARGET	TARGET TW II	CAPAIAN
1	Persentase Efektivitas penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan lingkup Stasiun PSDKP Belawan	93%	50	94,38
2	Persentase Efektivitas Penyelesaian Penanganan Barang Bukti lingkup Stasiun PSDP Belawan	93%	50	86,88
3	Persentase Efektivitas Penyelesaian Penanganan Awak Kapal lingkup Stasiun PSDKP Belawan	93%	50	85,63
4	Persentase Efektivitas pengenaan sanksi administratif lingkup Stasiun PSDKP Belawan	80%	0	0
5	Persentase Efektivitas Koordinasi dalam rangka penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan lingkup Stasiun PSDKP Belawan	80%	0	0

Penjelasan Pencapaian masing-masing IKU dari SK4.1 sebagai berikut:

1) **IKU Ke-8 Persentase Efektivitas penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)**

Persentase Efektivitas penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan merupakan capaian perkembangan yang telah dilaksanakan dalam proses penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan berdasarkan tahapan-tahapan proses penyidikan mulai tahapan gelar perkara awal sampai dengan penyerahan berkas perkara dari PPNS kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan mengacu kepada Keputusan Dirjen PSDKP Nomor: KEP.372/DJ-PSDKP/2011 perihal Petunjuk Teknis Penyidikan Tindak Pidana Perikanan.

Pada TW II tahun 2022 IKU Ke-8 Persentase Efektivitas penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan lingkup Stasiun PSDKP Belawan tercapai 94,38% dari Target 50%. Tercapaiannya target pada IKU ke-8 tersebut di karenakan :

1. PPNS Stasiun PSDKP Belawan telah banyak memiliki pengalaman dalam melaksanakan penyidikan perkara TPKP.

2. Tersusunnya jadwal PPNS Stasiun PSDKP Belawan di dalam melaksanakan kegiatan penyidikan TPKP.

Adapun Capaian IKU pada IKU Ke-8 Persentase Efektivitas penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan sebagaimana Tabel 17 berikut.

Tabel 12. Capaian IKU Ke-8 Persentase Efektivitas penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan

No	Perkara	Tersangka	Tanggal Tertangkap	TW II		Capaian TW II
				Perkembangan Kasus	Nilai Capaian Kinerja	
1	KM. PKFB 1337	MUHAMMAD FITRIADI	13 Januari 2022	Tahap II (Surat Pengantar dan BA)	100%	94,38%
2	KM. KHF 1971	NAI TOO	22 Januari 2022	Tahap II (Surat Pengantar dan BA)	100%	
3	KM. KF 2447	HERMANSYAH	22 Januari 2022	Tahap II (Surat Pengantar dan BA)	100%	
4	KM. PKFA 7496	JAKA SITORUS	5 Februari 2022	Tahap II (Surat Pengantar dan BA)	100%	
5	KM. PKFA 9546	AUNG KYAW SOE	26 Maret 2022	Tahap II (Surat Pengantar dan BA)	100%	
6	KM. KHF 1790	SOE TUN	23 Mei 2022	Pengiriman berkas (Surat Pengantar, Tanda Terima Penyerahan Tahap I)	95%	
7	KM. PKFB 1269	SU SU	8 Juni 2022	Pemeriksaan (Resume dan Sampul Berkas Perkara)	80%	
8	KM. PKFB 1280	THET LWIN	8 Juni 2022	Pemeriksaan (Resume dan Sampul Berkas Perkara)	80%	

IKU ini tidak dapat di bandingkan dengan capaian pada capaian TW II tahun 2021, karena merupakan IKU baru dan baru ada pada tahun 2022. Pada TW II

2022 belum ada realisasi anggaran, karena belum ada kasus yang di tangani. Untuk mendukung pencapaian IKU Persentase Penyelesaian Penyidikan TPKP lingkup Stasiun PSDKP Belawan didukung dengan anggaran sebesar Rp. 272.850.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp.95.792.000 atau 35,11%. Realisasi anggaran akan tercapai pada saat kasus telah diselesaikan sampai tahapan (P-21) berkas dinyatakan lengkap oleh jaksa. Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja pada Sub IKU ini dan analisis terhadap realisasi anggaran dapat disimpulkan belum efisien. Hal ini didasari oleh beberapa hal: capaian kinerja pada IKU ini sudah tercapai dengan realisasi anggaran masih sebesar 35,11%.

2) IKU Ke-9 Persentase Efektivitas Penyelesaian Penanganan Barang Bukti lingkup Stasiun PSDP Belawan (%)

Persentase Efektivitas Penyelesaian Penanganan Barang Bukti Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan merupakan capaian perkembangan tahapan Penanganan Barang Bukti pelaku tindak pidana kelautan dan perikanan berdasarkan tahapan-tahapan penanganan barang bukti yang dimulai dari tahapan penerimaan barang bukti sampai dengan penyerahan ke instansi terkait sesuai dengan Keputusan Dirjen PSDKP Nomor: KEP.378/DJ-PSDKP/2013 perihal Petunjuk Teknis Penanganan Barang Bukti Tindak Pidana Perikanan.

Pada TW II tahun 2022 IKU Ke-9 Persentase Efektivitas Penyelesaian Penanganan Barang Bukti lingkup Stasiun PSDP Belawan tercapai 86,88% dari Target 50%. Tercapainya target pada IKU ke-9 tersebut di karenakan :

1. PPNS Stasiun PSDKP Belawan telah banyak memiliki pengalaman dalam melaksanakan penyidikan perkara TPKP.
2. Tersusunnya jadwal PPNS Stasiun PSDKP Belawan di dalam melaksanakan kegiatan penyidikan TPKP.

Adapun Capaian IKU pada IKU Ke-9 Persentase Efektivitas Penyelesaian Penanganan Barang Bukti lingkup Stasiun PSDP Belawan sebagaimana Tabel 18 berikut.

Tabel 13. Capaian IKU Ke-9 Persentase Efektivitas Penyelesaian Penanganan Barang Bukti lingkup Stasiun PSDP Belawan

UPT	NAMA BARANG BUKTI UTAMA		NAMA TERSANGKA	POSISI BB UTAMA	CAPAIAN	NILAI CAPAIAN
STASIUN PSDKP BELAWAN	1	PKFB 1337	Muhammad Fitriadi	TPI Purnama Dumai	100%	86,88%
	2	KF 2447	Hermansyah	TPI Purnama Dumai	100%	
	3	PKFA 7496	Jaka Sitorus	TPI Purnama Dumai	100%	
	4	KHF 1971	Nai Too	Dermaga Gudang Swasta Gabion - Belawan	100%	
	5	PKFA 9546	Aung Kyaw Soe	Dermaga Gudang Swasta Gabion - Belawan	100%	
	6	KM. KHF 1790	Soe Tun	Pelabuhan Pendaratan Ikan Kuala Langsa	95%	
	7	KM. PKFB 1269	Su Su	Pelabuhan Pendaratan Ikan Kuala Langsa	50%	
	8	KM. PKFB 1280	Thet Lwin	Pelabuhan Pendaratan Ikan Kuala Langsa	50%	

Capaian IKU ke-9 ini tidak dapat di bandingkan dengan capaian TW II tahun 2021, karena merupakan IKU baru dan baru ada pada tahun 2022. Saat ini proses Penempatan atau penyimpanan barang bukti TPKP di tempat yang memadai dan telah di lakukan pemberian barang bukti identitas. Realisasi anggaran untuk mendukung pencapaian IKU Persentase Penyelesaian Penanganan Barbuk dan Awak Kapal TPKP lingkup Stasiun PSDKP Belawan samapai tanggal 30 Juni 2022 terealisasi sebesar Rp.12.000.000,- atau 10,55% dari total anggaran Rp. 113.704.000,-. Realisasi anggaran akan tercapai apabila berkas perkara barang bukti diserahkan ke kejaksaan atau penitipan barang bukti ke RUPABASAN. Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja pada Sub IKU ini dan analisis terhadap realisasi anggaran dapat disimpulkan belum efisien. Hal ini didasari oleh beberapa hal: capaian kinerja pada IKU ini sudah tercapai dengan realisasi anggaran masih sebesar 10,55%.

3) IKU Ke-10 Persentase Efektivitas Penyelesaian Penanganan Awak Kapal lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)

Persentase Efektivitas Penyelesaian Penanganan Awak Kapal Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan merupakan capaian perkembangan tahapan

Penanganan dan Awak Kapal pelaku tindak pidana kelautan dan perikanan berdasarkan tahapan-tahapan penanganan awak kapal TPKP yang dimulai dari tahapan penerimaan awak kapal sampai dengan penyerahan ke instansi terkait sesuai dengan Keputusan Dirjen PSDKP Nomor: 70 /DJ-PSDKP/2014 perihal Petunjuk Teknis Penanganan Awak Kapal Tindak Pidana Perikanan. Pada TW II tahun 2022 IKU Ke-10 Persentase Efektivitas Penyelesaian Penanganan Awak Kapal Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan lingkup Stasiun PSDP Belawan tercapai 85,63% dari Target 50%. Tercapainya target pada IKU ke-9 tersebut di karenakan :

1. PPNS Stasiun PSDKP Belawan telah banyak memiliki pengalaman dalam melaksanakan penyidikan perkara TPKP.
2. Tersusunnya jadwal PPNS Stasiun PSDKP Belawan di dalam melaksanakan kegiatan penyidikan TPKP.

Capaian IKU ke-10 ini tidak dapat di bandingkan dengan capaian TW II tahun 2021, karena merupakan IKU baru dan baru ada pada tahun 2022. Anggaran untuk mendukung pencapaian IKU Efektivitas Penyelesaian Penanganan Awak Kapal Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan lingkup Stasiun PSDKP Belawan terealisasi sebesar Rp.84.288.500,- dari total anggaran Rp.278.4000.000,- dengan persentase realisasi anggaran sebesar 30,28%.

4) **IKU Ke-11 Persentase Efektivitas penenaan sanksi administratif lingkup Stasiun PSDKP Belawan**

Persentase Efektivitas penenaan sanksi administratif merupakan capaian perkembangan yang telah dilaksanakan dalam proses penanganan sanksi administratif berdasarkan PERMEN-KP nomor 31 Tahun 2021 tentang Penenaan Sanksi Administratif di bidang Kelautan dan Perikanan. Pada TW II tahun 2022 IKU Ke-11 Persentase Efektivitas Penyelesaian Penanganan Awak Kapal Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan lingkup Stasiun PSDP Belawan tidak ada target capaian, IKU ini ditargetkan tercapai pada TW IV tahun 2022 dengan capaian sebesar 80%.

Capaian IKU ke-11 ini tidak dapat di bandingkan dengan capaian TW II tahun 2021, karena merupakan IKU baru dan baru ada pada tahun 2022. Anggaran untuk mendukung pencapaian IKU Efektivitas penenaan sanksi

administratif lingkup Stasiun PSDKP Belawan belum ada terealisasi atau sebesar Rp. 0,- dari total anggaran Rp.40.000.000,- dengan persentase realisasi anggaran sebesar 0%.

- 5) **IKU-12 Persentase Efektivitas Koordinasi dalam rangka penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan lingkup Stasiun PSDKP Belawan**
- Persentase Efektivitas Koordinasi dalam rangka penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan lingkup UPT DJPSDKP dilaksanakan berdasarkan pelaksanaan Forum Koordinasi masing – masing daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor PER.18/MEN/2011 tentang Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 62/PERMEN-KP/2020 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pada TW II Tahun 2022 Stasiun belum melaksanakan Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan, sehingga belum ada capaian IKU pada TW II Tahun 2022. IKU ini di targetkan akan teralisasi pada TW IV Tahun 2022 dengan target capaian sebesar 80%. Anggaran untuk mendukung pencapaian IKU Persentase Efektivitas Koordinasi dalam rangka penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan lingkup Stasiun PSDKP Belawan belum ada terealisasi atau sebesar Rp. 0,- dari total anggaran Rp.50.714.000,- dengan persentase realisasi anggaran sebesar 0%.

7. **Sasaran Kegiatan 5.1 : Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP**

Dalam rangka pencapaian SK5.1 “Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen. PSDKP” Stasiun PSDKP Belawan telah mengidentifikasi ke dalam 2 (dua) IKU dan 13 (tiga) IK. IKU tersebut terdiri dari: **(1) IKU Ke-13 Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan lingkup Stasiun PSDKP Belawan (indeks); (2) IKU Ke-14 Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) lingkup Stasiun PSDKP Belawan (indeks) (3) IK Ke-15 Nilai WBK Stasiun PSDKP Belawan (nilai); (4) IK Ke-16 Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Belawan (indeks); (5) IK Ke-17**

Nilai Rekonsiliasi Kinerja Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (nilai); (6) IK Ke-18 Nilai Implementasi Program Budaya Kerja; (7) IK Ke-19 Inovasi gugus kerja transformasi yang dihasilkan lingkup Stasiun PSDKP Belawan (inovasi); (8) IK Ke-20 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%); (9) IK Ke-21 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%); (10) IK Ke-22 Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%); (11) IK Ke-23 Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Belawan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%); (12) IK Ke-24 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%) (nilai); (13) IK Ke-25 Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Stasiun PSDKP Belawan (nilai).

Penjelasan Pencapaian masing-masing IKU dari SK5.1 sebagai berikut:

IKU Ke- 13 Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan lingkup Stasiun PSDKP Belawan

Capaian IKU Ke-13 Pemenuhan Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan pada Triwulan II Tahun 2022 tercapai 88,8%, dari target yang telah ditetapkan pada TW II tahun 2022 yaitu sebesar 80 atau dengan presentase capaian 111%. IKU tersebut merupakan indikator kinerja yang ditetapkan berdasarkan Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024. Apabila dibandingkan dengan TW II tahun 2021 terdapat penurunan persentase capaian sebesar 0,67%, karena capaian Pada TW II tahun 2021 IKU ke-13 ini sebesar 89,47%. Survei dilakukan terhadap 181 orang pengguna jasa layanan SLO yang ada di wilayah kerja Stasiun PSDKP Belawan dengan latar Pendidikan dari SD, SMP, SLTA, DIII dan S1.

Pencapaian IKU tersebut dapat dilihat pada gambar 2 berikut:



Gambar 2. Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan SLO lingkup Stasiun PSDKP Belawan

IKU Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan merupakan kegiatan pengumpulan data dan informasi terkait pelayanan yang ada di Lingkup Stasiun PSDKP Belawan yaitu SLO (Surat Laik Operasi). Metode yang digunakan dalam pengumpulan data tersebut adalah dengan cara survei. Survei kepuasan masyarakat dilakukan setiap Triwulan atau setahun 4 kali sehingga sampai dengan periode ini IKU Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan belum terealisasi.

IKU Ke-14 Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan LVHPI Perikanan lingkup Stasiun PSDKP Belawan

Capaian IKU Ke-14 Pemenuhan Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna LVHPI pada Triwulan II Tahun 2022 tercapai 92,02 dari target yang telah ditetapkan pada TW II tahun 2022 yaitu sebesar 80 atau dengan presentase capaian 115,03%. IKU tersebut merupakan indikator kinerja yang ditetapkan berdasarkan Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024. Apabila dibandingkan dengan capaian pada TW II tahun 2021 IKU ke-14 mengalami peningkatan persentase capaian sebesar 2,02%, karena pada TW II tahun 2022 capaiannya sebesar 90 %. Survei dilakukan terhadap 10 orang pengguna jasa layanan LVHPI yang ada di wilayah kerja Stasiun PSDKP Belawan dengan latar

Pendidikan dari SD, SMP, SLTA, DIII dan S1. Pencapaian IKU tersebut dapat dilihat pada gambar 3 berikut:



Gambar 3. Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan LVHPI Lingkup Stasiun PSDKP Belawan

IKU Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan LVHPI merupakan kegiatan pengumpulan data dan informasi terkait pelayanan yang ada di Lingkup Stasiun PSDKP Belawan yaitu LVHPI. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data tersebut adalah dengan cara survei. Survei kepuasan masyarakat dilakukan setiap triwulan atau setahun 4 kali sehingga sampai dengan periode ini IKU LVHPI belum terealisasi.

IK Ke-15 Nilai WBK Stasiun PSDKP Belawan (nilai)

Penilaian untuk IK Ke-15 yaitu Nilai WBK Stasiun PSDKP Belawan terdiri atas Komponen penilaian Wilayah Bebas Korupsi (WBK) meliputi manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja sesuai dengan PERMEN PAN dan RB Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah dan jika dinilai melalui penilaian mandiri berdasarkan Permen KP Nomor: 62/PERMEN-KP/2017

Tentang Pedoman Pembangunan dan Penetapan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pada periode TW II tahun 2022 IK ke-15 belum ada capaian, IK ini akan tercapai dengan batas nilai terendah 75 pada TW IV tahun 2022.

IK Ke-16 Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Belawan

Pengembangan SDM sebagai sumber daya pengawasan SDKP, menekankan manusia sebagai pelaku pengawasan yang memiliki etos kerja produktif, keterampilan, kreativitas, disiplin, profesionalisme, loyalitas serta memiliki kemampuan memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi maupun kemampuan manajemen. Hal ini harus terus dikembangkan baik secara kualitas maupun kuantitas guna keberhasilan pengawasan SDKP.

IKU Ke-16 yang digunakan adalah “indeks kompetensi dan integritas Stasiun PSDKP Belawan” dimana capaian yang diperoleh melalui metode adopsi langsung dari atasan dengan target telah diseragamkan bagi seluruh Eselon I lingkup KKP yaitu sebesar 73. Pengukuran capaian indikator kinerja ini menggunakan 4 variabel, yaitu: 1) hasil *asesment* eselon IV lingkup Ditjen. PSDKP; 2) tingkat kehadiran pegawai melalui absensi *e-presensi mobile*; 3) Capaian SKP; dan 4) LHKPN dan LHKASN. Pada Triwulan II Tahun 2022 capaian IKU indeks kompetensi dan integritas Stasiun PSDKP Belawan tercapai sebesar 79,28 atau 113,26% dari target 70 pada TW II. IKU Ke-16 diukur per semester yaitu dengan perhitungan pada Semester I dengan target 70 dan Semester II dengan target 77 pada tahun 2022.

IK ke-17 Nilai Rekonsiliasi Kinerja Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (nilai)

Pengukuran capaian indikator Nilai Rekonsiliasi Kinerja Lingkup Stasiun PSDKP Belawan ditargetkan dalam satu tahun dengan bobot nilai 90. Perhitungan capaian Nilai Rekonsiliasi Kinerja Lingkup Stasiun PSDKP Belawan pada tahun 2022 didapatkan dari hasil Rekonsiliasi yang dilakukan oleh internal PSDKP maupun Biro perencanaan KKP. Pada TW II tahun 2022 IK ke-17 belum ada capaian, IKU ini akan tercapai pada TW IV tahun 2022 dengan target nilai rekonsiliasi kinerja lingkup Stasiun PSDKP Belawan sebesar 90.

IK Ke-18 Nilai Implementasi Program Budaya Kerja

Nilai Implementasi Program Budaya Kerja tingkat Ditjen. PSDKP dengan target 21 per triwulan, yang diperoleh dari: (1) Nilai implementasi program budaya kerja adalah indikator yang menunjukkan keberhasilan implementasi program budaya kerja di lingkungan Satker; (2) Nilai implementasi program budaya kerja diperoleh dari hasil pengukuran mandiri oleh Komite dan Tim Budaya Kerja Satker, menggunakan LKE Pelaksanaan Program Budaya Kerja. IK Ke-18 ini akan dilakukan pengukuran pada TW IV dengan target yang ditetapkan 21. IK Ke-18 tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada TW II tahun 2021 dikarenakan ini merupakan IK baru di tahun 2022.

IK Ke-19 Inovasi Gugus Kerja Transformasi yang di hasilkan lingkup Stasiun PSDKP Belawan

IK Ke-19 Inovasi adalah terobosan pada norma, standar, prosedur, kriteria baik bersifat manual/mekanikal maupun memanfaatkan teknologi informasi pada 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi.

Perhitungan jumlah inovasi diperoleh melalui perumusan inovasi dari 5 (lima) Satuan Kerja Pusat. **Setiap Satuan Kerja wajib menghasilkan 1 (satu) inovasi.** Tahun 2022 Stasiun Pengawasan SDKP Belawan di bebaskan 1 (satu) inovasi yang harus dihasilkan sebagai kinerja organisasi. Pencapaian kinerja pada TW II tahun 2022 belum dihitung, perhitungan pencapaian IK ini pada TW IV tahun 2022.

IK Ke-20 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Stasiun PSDKP Belawan

IK Ke-20 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Stasiun PSDKP Belawan yaitu Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN lingkup Unit Kerja yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

- 1) Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2020 (bobot 10%);

- 2) Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal hingga triwulan 4 tahun 2020 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%);
- 3) Tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset) Tahun 2017-2019 (bobot 20%);
- 4) Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2020 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 25%); dan
- 5) Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 20%).

Capaian kinerja untuk IK Ke-20 pada periode TW II tahun 2022 belum dapat diukur/dihitung, Pengukuran/penilaian dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal pada Triwulan IV tahun 2022 dengan target nilai 75%.

IK Ke-21 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)

IK Ke-21 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/ Jasa Lingkup Stasiun PSDKP Belawan yaitu Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengadaan Barang/Jasa lingkup Unit Kerja yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tingkat kepatuhan PBJ Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

- 1) Rencana umum pengadaan telah diupload ke dalam aplikasi SIRUP (20%);
- 2) Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE (30%);
- 3) Laporan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa (20%);
- 4) Kesesuaian tahap pelaksanaan (30%).

Capaian kinerja untuk IK Ke-21 pada periode TW II tahun 2022 belum dapat diukur/dihitung, Pengukuran/penilaian dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal pada Triwulan IV tahun 2022 dengan target nilai 75%.

IK Ke-22 Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Belawan

Pengukuran capaian indikator kinerja ini menggunakan Aplikasi Bitrix24.com dengan target 86% per triwulan pada tahun 2022. Perhitungan capaian Presentase unit kerja Stasiun PSDKP Belawan yang menerapkan sistem

manajemen pengetahuan yang terstandar pada Triwulan II tahun 2022 mengadopsi dari data yang diberikan oleh Eselon I yaitu dengan capaian pada TW II sebesar 98,89% melebihi dari target yang di tetapkan pada TW II yaitu sebesar 86%. Data dan informasi yang disajikan dalam Bitrix24.com Stasiun PSDKP Belawan diantaranya berupa: Berita Pengawasan, kegiatan yang dilaksanakan di lingkup Stasiun PSDKP Belawan, Profil Stasiun PSDKP Belawan serta Satuan Pengawas (Satwas) SDKP dan Wilker di lingkup Stasiun PSDKP Belawan, Informasi Pelayanan Publik di Stasiun PSDKP Belawan, Update Data Penerbitan SLO.

Bila dibandingkan dengan Capaian IK pada TW II tahun 2021, IK Ke-22 ini memperoleh capaian yang sama bila dibandingkan dengan capaian TW II tahun 2021 sebesar 98,89%, Capaian IK Presentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Belawan dapat dilihat pada gambar 4 berikut

No	UPT PSDKP	Target Tw II	Realisasi Tw I	Realisasi Tw II	Nilai Rata-rata
1	JAKARTA	86%	88,33%	100%	94,17%
2	BITUNG	86%	88,33%	100%	94,17%
3	LAMPULO	86%	100%	94,17%	97,08%
4	BATAM	86%	98,89%	52,22%	75,56%
5	BENOA	86%	100%	100%	100%
7	TUAL	86%	100%	100%	100%
6	BELAWAN	86%	87,22%	98,89%	93,05%
8	PONTIANAK	86%	86,11%	97,78%	91,94%
9	TARAKAN	86%	88,33%	82,50%	85,42%
10	CILACAP	86%	100%	92,22%	96,11%
11	KUPANG	86%	100%	90,28%	95,14%
12	AMBON	86%	100%	100%	100%
13	TAHUNA	86%	100%	100%	100%
14	BIAK	86%	100%	100%	100%

Gambar 4. Capaian IKU Presentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Belawan

IK Ke-23 Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Belawan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)

Capaian persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Belawan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan merupakan Jumlah dokumen hasil rekomendasi pengawasan

Inspektorat Jenderal kepada Sekretariat Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab). UPT yang tidak terdapat rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal yang akan ditindaklanjuti maka dianggap tuntas dan memenuhi target. Dikarenakan pengawasan Inspektorat Jenderal bersifat *conditional* atau tidak dapat diprediksi. Pada TW II tahun 2022, Stasiun PSDKP Belawan tidak memiliki rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal yang akan ditindaklanjuti sehingga IK ke-23 ini di anggap tercapai sesuai target yaitu 70% dengan persentase capaian 100%. IK ke-23 tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada TW II tahun 2021 dikarenakan ini merupakan IK baru di tahun 2022. Pada TW II Tahun 2022 IK ini di targetkan sebesar 70%, dengan realisasi capaian pada TW II 2022 sebesar 70% atau dengan persentase capaian sebesar 100%.

IK Ke-24 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PSDKP Belawan

Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah sebagai evaluasi dan *spending review* terhadap optimalisasi peran belanja Kementerian/Lembaga dalam rangka ketahanan fiskal dan ekonomi dengan berdasarkan 8 (Delapan) Indikator Pelaksanaan Anggaran yaitu; Capaian Output, Revisi DIPA, Halaman III DIPA, Pengelolaan UP dan TUP, Data Kontrak, Penyelesaian Tagihan, Penyerapan Anggaran, Dispensasi Penyampaian SPM. Penghitungan capaian kinerja diperoleh dari hasil penghitungan yang dilakukan dalam aplikasi Sistem Online Monitoring SPAN (OMSPAN) Kementerian Keuangan. Capaian Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Lingkup Stasiun PSDKP Belawan pada TW II Tahun 2022 sebesar 94,21 atau 117,76% dari target TW II Tahun 2022 sebesar 80. Capaian IK ke-24 ini lebih besar 18,78% bila dibandingkan dengan capaian pada TW II tahun 2021, karena pada TW II tahun 2021 capaian IK ini sebesar 75,43%. IK Ke-24 akan dilakukan pengukuran pada tiap semester, dengan target yang ditetapkan pada Semester I sebesar 80% dan Semester II sebesar 89 pada tahun 2022.

IK Ke-25 Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Lingkup Stasiun PSDKP Belawan

Nilai Kinerja anggaran adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yg dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya. Nilai diperoleh dari data input dan output yang dimasukkan oleh Satuan Kerja Stasiun PSDKP Belawan pada tahun 2022 kedalam aplikasi SMART Kemenkeu (monev.anggaran.kemenkeu.go.id). IK ke-25 pada periode TW II tahun 2022 tidak dilakukan pengukuran dan tidak dapat dibandingkan dengan capaian IKU pada TW II tahun 2021, karena IKU ini merupakan IKU baru dan baru ada pada tahun 2022. IK ini akan diukur kinerjanya pada TW IV tahun 2022 dengan target yang telah ditetapkan sebesar 81.

3. Akuntabilitas Keuangan

Anggaran yang dikelola Stasiun Pengawasan SDKP Belawan pada Tahun 2022 sesuai DIPA Nomor: SP DIPA – 032.05.2.440831/2022 tanggal 14 Desember 2021, mendapat alokasi dana sebesar **34.265.069.000,-** (Tiga Puluh Empat Milyar Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Enam Puluh Sembilan Rupiah). Realisasi anggaran tahun 2022 yang telah dicapai oleh Stasiun Pengawasan SDKP Belawan sampai dengan 30 Juni 2022 (Triwulan II) sebesar **48,06%** atau sebesar Rp **16.468.253.034,-** (Enam Belas Milyar Empat Ratus Enam Puluh Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Tiga Juta Tiga Puluh Empat Rupiah).

Rincian penyerapan anggaran per kegiatan dapat dilihat pada Tabel.19 berikut.

Tabel 14. Rincian Penyerapan Anggaran per Kegiatan Stasiun Pengawasan SDKP Belawan periode Januari – Juni 2022

Kode	Kegiatan/Sub Kegiatan/Jenis Belanja/Rincian Belanja	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Sisa Anggaran (Rp)
2350	Peningkatan Operasional Pengoperasian Kapal Pengawas	19.879.483.000	9.788.429.760	49,24	10.091.053.240
2351	Program Penyelesaian Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan Dan Perikanan	755.668.000	195.080.500	25,82	560.587.500
2352	Program Peningkatan Operasional Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	130.923.000	30.139.040	23,02	100.783.960

Kode	Kegiatan/Sub Kegiatan/Jenis Belanja/Rincian Belanja	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Sisa Anggaran (Rp)
2353	Program Peningkatan Operasional Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	1.534.550.000	377.779.282	24,62	1.156.770.718
2355	Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PSDKP	11.964.445.000	6.076.824.452	50,79	9.751.198.709
TOTAL		34.265.069.000	16.468.253.034	48,06	17.796.815.966

Sumber: Bagian Keuangan Stasiun PSDKP Belawan

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Laporan Kinerja (LKj) Stasiun PSDKP Belawan Triwulan II Tahun 2022 menyajikan capaian sasaran strategis Stasiun PSDKP Belawan pada tahun anggaran 2022, yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Terhadap capaian IKU tersebut dilakukan analisis dan evaluasi sebagai bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan dalam satu periode Renstra yang berkesinambungan.
2. Pelaksanaan tugas dan fungsi, Stasiun PSDKP Belawan berlandaskan kepada tujuan sasaran dan program kerja yang telah ditetapkan didalam Renstra KKP, Renstra Ditjen. PSDKP, dan kontrak kinerja antara Direktur Jenderal PSDKP (sebagai pemberi amanah) dengan Kepala Stasiun PSDKP Belawan (sebagai penerima amanah) sebagai acuan dalam pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan.

B. Saran

Sebagai upaya peningkatan kinerja pada triwulan berikutnya terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti, sebagai berikut:

1. Perlunya Monitoring dan Evaluasi Pengawasan Stasiun PSDKP Belawan secara berkala.

Rencana tindak lanjut:

1. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Pengawasan Stasiun PSDKP Belawan secara berkala.

LAMPIRAN

1. Lampiran Perjanjian Kinerja



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NO. 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON: (021) 3519070 FAKSIMILE: (021) 3520346
WEBSITE: www.djpsdkp.kkp.go.id EMAIL: ditjenpsdkp@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 STASIUN PENGAWASAN SDKP BELAWAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Andri Fahrulsyah**
Jabatan : Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Adin Nurawaluddin**
Jabatan : Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 3 Januari 2022

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Adin Nurawaluddin

Pihak Pertama
Kepala Stasiun Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan

Andri Fahrulsyah

"Bekerja dengan integritas dan totalitas"

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
STASIUN PSDKP BELAWAN**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
KEGIATAN 1. PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN				
SK1.1	Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan kelautan yang sesuai ketentuan	ISK1.1.1	Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	100
KEGIATAN 2. PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN				
SK2.1	Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan perikanan yang sesuai ketentuan	ISK2.1.1	Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	100
KEGIATAN 3. PEMANTAUAN, OPERASI ARMADA DAN INFRASTRUKTUR PENGAWASAN				
SK3.1	Terselenggaranya pengawasan sistem berbasis masyarakat yang partisipatif	ISK3.1.1	Persentase Pokmaswas yang aktif mendukung pengawasan SDKP (%)	87
SK3.2	Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP yang efektif	ISK3.2.1	Indeks kinerja operasional kapal pengawas (indeks)	87,5
		ISK3.2.2	Indeks kinerja operasional speedboat pengawas (indeks)	87,5
		ISK3.2.3	Indeks pemenuhan logistik armada pengawasan SDKP (Indeks)	90
SK3.3	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	ISK3.3.1	Persentase penyelesaian perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP (%)	100
KEGIATAN 4. PENANGANAN PELANGGARAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				
SK4.1	Terselenggaranya penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan yang efektif	ISK4.1.1	Persentase efektifitas penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	93
		ISK4.1.2	Persentase efektifitas penyelesaian penanganan barang bukti Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	93
		ISK4.1.3	Persentase efektifitas penyelesaian penanganan awak kapal Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	93
		ISK4.1.4	Persentase efektifitas penerapan sanksi administratif Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	80
		ISK4.1.5	Persentase efektifitas koordinasi dalam rangka penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	80

"Bekerja dengan integritas dan totalitas"

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
KEGIATAN 5. DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL LINGKUP DITJEN. PSDKP				
SK5.1	Tata kelola pemerintah yang baik lingkup Ditjen PSDKP	ISK5.1.1	Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) kapal perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (indeks)	80
		ISK5.1.2	Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi hasil Penangkapan Ikan) Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (indeks)	80
		ISK5.1.3	Nilai WBK Stasiun PSDKP Belawan (nilai)	75
		ISK5.1.4	Indeks profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (indeks)	77
		ISK5.1.5	Nilai rekonsiliasi kinerja Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (nilai)	90
		ISK5.1.6	Nilai implementasi program budaya kerja Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (nilai)	21
		ISK5.1.7	Inovasi gugus kerja transformasi yang di hasilkan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (inovasi)	1
		ISK5.1.8	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	75
		ISK5.1.9	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	75
		ISK5.1.10	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	86
		ISK5.1.11	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	70
		ISK5.1.12	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (nilai)	89
		ISK5.1.13	Nilai kinerja anggaran (NKA) Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (nilai)	81

"Berkerja dengan integritas dan totalitas"

Data Anggaran

NO	KEGIATAN/SASARAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
Kegiatan 1	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	130.923.000
SK1.1	<i>Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan kelautan yang sesuai ketentuan</i>	
Kegiatan 2	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	1.534.550.000
SK2.1	<i>Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan perikanan yang sesuai ketentuan</i>	
Kegiatan 3	Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan	19.879.483.000
SK3.1	<i>Terselenggaranya pengawasan sistem berbasis masyarakat yang partisipatif</i>	
SK3.2	<i>Terselenggaranya pemantauan dan operasi armada SDKP yang efektif</i>	
SK3.3	<i>Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan</i>	
Kegiatan 4	Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan	755.668.000
SK4.1	<i>Terselenggaranya penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan yang efektif</i>	
Kegiatan 5	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	11.964.445.000
SK5.1	<i>Tata kelola pemerintah yang baik lingkup Ditjen PSDKP</i>	
Total Anggaran		34.265.069.000

Jakarta, 3 Januari 2022

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan


Adin Nurawaluddin

Pihak Pertama
Kepala Stasiun Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan


Andri Fahrulisyah

"Bekerja dengan integritas dan totalitas"